



LAPORAN CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN 2024



2025

KATA PENGANTAR

Segala Puji hanya milik Allah SWT, Shalawat dan Salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW karena berkat limpahan dan rahmatnya, Pemerintah Kota Binjai dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Binjai Tahun 2024.

Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat dengan tujuan untuk menginformasikan secara rinci upaya yang telah dilakukan dan capaian yang telah diraih yaitu dengan mengukur hasil pencapaian indikator-indikator sasaran misi pada dokumen RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Binjai yang dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Binjai Tahun 2024. Penyusunan Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Binjai Tahun 2024 sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Pemerintah Daerah selama tahun 2024, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Binjai Tahun 2024 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota Binjai yaitu:

“MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS”

sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Binjai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Binjai tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta

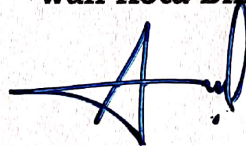
pengawasannya.

Besar harapan kami bahwa penyajian Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Binjai Tahun 2024 ini dapat menjadi cermin dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota Binjai secara berkelanjutan dalam rangka memperbaiki kinerja di masa yang akan datang. Namun kami menyadari bahwa Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Binjai Tahun 2024 ini masih belum sempurna menyajikan yang lebih baik. Pada hakekatnya laporan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan guna perbaikan perencanaan dan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Binjai pada masa yang akan datang.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Binjai Tahun 2024. Semoga Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Binjai ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Pemerintah Kota Binjai.

Binjai, 27 Maret 2025

Wali Kota Binjai



Amir Hamzah

DAFTAR ISI

i KATA PENGANTAR

iii DAFTAR ISI

v PERNYATAAN TELAH DIREVIU

**1 BAB I
PERENCANAAN KINERJA**

2 a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Binjai 2021 s.d 2026

10 b. Perjanjian Kinerja Walikota Binjai 2024

**12 BAB II
CAPAIAN AKUNTABILITAS
KINERJA**

13 A. Capaian Kinerja

13 a. Capaian Perjanjian Kinerja 2024

57 b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2024
dengan Realisasi Tahun 2023 dan 2022

61 c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2024
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
dokumen perencanaan jangka menengah/RPJMD

65 d. Perbandingan Kinerja Tahun ini dengan Standar
Nasional

- 73 e. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
 - 75 f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
 - 80 g. Analisis Atas Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- 80 Realisasi Anggaran



PEMERINTAH KOTA BINJAI

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 2 Binjai Kota, Kota Binjai Sumatera Utara 20714
Telp. (061) 8821860 Laman: inspektorat.binjaikota.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Binjai untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Binjai dalam hal ini disusun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Binjai.

Reviu bertujuan memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Binjai, 25 Maret 2025

Inspektur Daerah



Eka Edi Saputra
Drs EKA EDI SAPUTRA, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196711201986031002

BAB I PERENCANAAN KINERJA



2024

BAB I

PERENCANAAN KINERJA

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai 2021 s.d 2026

Visi dan misi Pemerintah Kota Binjai telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global serta nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

1. Visi

Visi Kota Binjai sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah:

MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS

Visi tersebut mengandung maksud bahwa:

- a. MAJU** mengandung pengertian bahwa seiring berjalannya waktu, Kota Binjai harus terus maju bergerak kearah yang lebih baik, mengalami peningkatan pada semua aspek kehidupan demi kesejahteraan masyarakatnya.
- b. BERBUDAYA** mengandung pengertian bahwa pelaksanaan pembangunan Kota Binjai berpedoman pada nilai-nilai dan norma-norma kearifan lokal dalam kebudayaan yang berlaku di masyarakat sebagai filterisasi pengaruh negatif globalisasi. Kebudayaan juga mendukung pembangunan kepribadian dan karakter masyarakat yang lebih baik seperti rukun dan damai, taat azas, taat aturan, peduli dan bertoleransi sehingga tercipta masyarakat yang teratur memiliki ciri khas tersendiri sebagai kota maju dibanding daerah lainnya.
- c. RELIGIUS** mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis keagamaan menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi " **MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS**" dirumuskan 3 (tiga) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional.
- b. Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan.
- c. Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas.

Penjelasan makna atas pernyataan misi dimaksud adalah:

- a. Misi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, melayani dan profesional mempunyai pengertian bahwa segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, melayani dan dapat dipercaya dalam mengemban amanat masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini dianggap penting karena untuk menjalankan misi selanjutnya memang dibutuhkan sistem kerja yang baik dan terukur serta Aparatur Sipil Negara yang mumpuni, memiliki etos kerja, etika, kreatifitas dan keahlian dalam bidangnya masing-masing.

Adapun program prioritas untuk mewujudkan Misi Pertama adalah:

1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi;
2. Perubahan budaya Aparatur Sipil Negara kearah melayani dan mengayomi serta peningkatan SDM berbasis akhlak dan wawasan kebangsaan;
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima;
4. Penempatan pejabat Aparatur Sipil Negara sesuai disiplin ilmu yang dimiliki (the right man on the right place).

- b. Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan adalah upaya pemerintah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk membangun sarana prasarana (infrastruktur) dan penunjangnya yang dibutuhkan dan memiliki daya dorong terhadap laju pertumbuhan perekonomian berbasis potensi khas daerah dengan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat serta tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup.

Dalam rangka mewujudkan Misi Kedua, pelaksanaan pembangunan infrastruktur bertumpu pada pengembangan industri jasa, perdagangan, sumber daya manusia dan sumber daya fisik (buatan) serta memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir dampak negatif yang terjadi akibat pembangunan yang kurang memperhatikan kapasitas sumber daya yang ada. Beberapa program prioritas untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah, antara lain:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar wilayah yang menyebar dan merata;
2. Pemanfaatan sumber daya alam lokal untuk peningkatan perekonomian masyarakat dengan memperhatikan aspek lingkungan;
3. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kemampuan pengelolaan dan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
4. Peningkatan kualitas SDM pencari kerja;
5. Pengembangan sentra-sentra industri potensial dan produk lokal;
6. Mendorong dan memfasilitasi pertumbuhan industri perdagangan dan jasa serta industri ekonomi kreatif;
7. Peningkatan pelestarian lingkungan hidup.

- c. Misi Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas merupakan upaya Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan sarana prasarana (infrastruktur) pendidikan, mutu pendidikan, kesehatan dan

kesejahteraan sosial dalam rangka memacu kualitas sumber daya manusia yang handal, produktif, memiliki kondisi jiwa raga yang sehat dan sejahtera serta memiliki kearifan budaya dan akhlakul kharimah.

Adapun program prioritas untuk mewujudkan Misi Ketiga adalah:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berlandaskan iman dan taqwa;
2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, sarana penunjang pendidikan dan tenaga kependidikan;
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu;
4. Meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
5. Pembinaan olah raga, kepemudaan, pagayuban, organisasi kemasyarakatan, agama, etnis dan kebudayaan;
6. Meningkatkan implementasi norma-norma budaya dan religius dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran, dan Target Kinerja

Untuk mencapai ketiga misi pembangunan Kota Binjai dalam jangka menengah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi tersebut. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran operasional untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan indikator tujuan, indikator sasaran, serta target yang hendak dicapai untuk selama 1 (satu) periode RPJMD yaitu 2021 s.d 2026.

Tabel tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, dan target kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja 2021-2026

| VISI : Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------------|--|----------------------------|----------|--------------|--------|------|------|------|------|
| No | Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | Target | | | | |
| | | | | | | | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Misi 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional | Mewujudkan pelayanan birokrasi khususnya perizinan yang efektif dan efisien bagi masyarakat | Indeks Reformasi Birokrasi | | | Kategori | NA | CC | B | B | BB | BB |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan | Opini BPK | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | | | | Indeks Profesionalitas ASN | Poin | 29,98 | 65 | 68 | 71 | 75 | 81 |
| | | | Nilai Evaluasi LPPD | Poin | 3,22 | 3,32 | 3,34 | 3,36 | 3,38 | 3,40 | | |

VISI : Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius

| No | Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | Target | | | | | | | |
|----|--|---|---------------------------------------|---------|-------------------|--------|---|--|----------------------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| | | | | | | | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| 2 | Misi 2 : Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan | Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah kecamatan yang berwawasan lingkungan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur | | | nilai | NA | 77 (B) | 80 (B) | 83 (B) | 86 (B) | 89 (A) | | | |
| | | | | | | | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik | Persentase kondisi jalan baik | Persen | 89,86 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| | | | | | | | | Persentase akses air minum kota | Persen | 28 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 |
| | | | | | | | | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Poin | 47,1 | 54,0 | 59,0 | 61,0 | 64,0 |

VISI : Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius

| No | Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | Target | | | | |
|----|---|--|----------------------------|--|---|--------|--------------|--------|------|------|------|------|
| | | | | | | | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan | Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) | Meningkatnya peranan sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan | Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB) | Persen | 11,12 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 11,9 | 12,0 |
| | Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB) | | | | Persen | 29,20 | 29,7 | 30,0 | 30,2 | 30,5 | 30,7 | |
| | Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB (ADHB) | | | | Persen | 41,2 | 41,4 | 41,5 | 41,7 | 41,8 | 42,0 | |
| | Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya Sentra Industri Binjai | | | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Persen | 7,08 | 6,8 | 6,5 | 6,4 | 6,2 | 6,0 | |

VISI : Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius

| No | Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | Target | | | | |
|----|--|--|----------------------------------|---|--------------------|--------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 3 | Misi 3 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas | Meningkatkan akses, cakupan dan kualitas/mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | | | poin | 75,89 | 76,80 | 77,35 | 77,90 | 78,50 | 79,10 |
| | | | | Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan | Indeks Pendidikan | poin | 74,27 | 75,12 | 75,74 | 76,03 | 76,66 | 76,96 |
| | | | | Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan | Indek Kesehatan | poin | 80,58 | 81,35 | 81,62 | 82,02 | 82,28 | 82,68 |
| | | | | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat | Indeks Pengeluaran | poin | 73,04 | 74,74 | 76,39 | 78,05 | 79,73 | 81,43 |

b. Perjanjian Kinerja Walikota Binjai 2024

Untuk memastikan ketercapaian rencana kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD 2021-2026, maka setiap Pemerintah Kota Binjai menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai sebuah perencanaan tahunan. Penyusunan Perjanjian Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja adalah bentuk komitmen kinerja yang berisikan hasil kerja (*outcome*) dari pelaksanaan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, serta dilengkapi dengan besaran target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2024. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Berikut tabel Perjanjian Kinerja Kota Binjai Tahun 2024.

Tabel 1.2 Perjanjian Kinerja Walikota Binjai Tahun 2024

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|----|---|---------------------------------------|----------|--------|
| 1 | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan | Indeks Reformasi Birokrasi | Kategori | B |
| | | Opini BPK | Opini | WTP |
| | | Indeks Profesionalitas ASN | Poin | 73,00 |
| | | Nilai Evaluasi LPPD | Poin | 3,36 |
| 2 | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur | Nilai | 83 (B) |
| | | Persentase kondisi jalan baik | Persen | 94,00 |
| | | Persentase akses air minum kota | Persen | 98,05 |
| 3 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Poin | 61,00 |

| | | | | |
|---|---|--|--------|-------|
| 4 | Meningkatnya peranan sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan | Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB) | Persen | 11,80 |
| | | Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB) | Persen | 30,20 |
| | | Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB (ADHB) | Persen | 41,70 |
| 5 | Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya Sentra Industri Binjai | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | persen | 6,10 |
| 6 | Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan | Indeks Pendidikan | Poin | 76,66 |
| 7 | Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan | Indeks Kesehatan | Poin | 83,35 |
| 8 | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat | Indeks Pengeluaran | Poin | 78,05 |

BAB II

CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA



2024

BAB II

CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

a. Capaian Perjanjian Kinerja 2024

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setelah diawal tahun ditetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2024, dan sepanjang tahun dilaksanakan program dan kegiatan yang dilakukan sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di RPJMD 2021- 2026, dan Perjanjian Kinerja 2024, maka pada akhir tahun 2024 dan/atau awal tahun 2025 dilakukan pengukuran realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran realisasi indikator kinerja ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Kota Binjai dapat mencapai target- target yang telah diperjanjikan.

Pengukuran kinerja tidak hanya dilakukan oleh internal Pemerintah Kota Binjai sendiri, namun juga dilakukan oleh pihak-pihak lainnya, misalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Binjai, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional Medan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).

Hasil pengukuran realisasi indikator kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Walikota Binjai adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Hasil Pengukuran Target dan Realisasi Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | Sumber Data |
|-----|---|---------------------------------------|----------|--------|-----------|---------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) = (6)/(5) | (8) |
| 1 | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan | Indeks Reformasi Birokrasi | Kategori | B | B | 100% | Kementerian PANRB |
| | | Opini BPK | Opini | WTP | WTP | 100% | BPK Perwakilan Sumatera Utara |
| | | Indeks Profesionalitas ASN | Poin | 73,00 | 74,52* | 102% | Kantor Regional VI BKN Medan |
| | | Nilai Evaluasi LPPD | Poin | 3,36 | 2,6671* | 79% | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 |
| 2 | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur | Nilai | 83 (B) | 83,3 (B) | 100% | Bapperida Kota Binjai |
| | | Persentase kondisi jalan baik | Persen | 94,00 | 90,00 | 96% | BPS Kota Binjai |
| | | Persentase akses air minum kota | Persen | 98,05 | 100 | 102% | BPS Kota Binjai |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | Sumber Data |
|-----|---|--|--------|--------|-----------|---------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) = (6)/(5) | (8) |
| 3 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Poin | 61,00 | 60,81 | 99,69% | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 4 | Meningkatnya peranan sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan | Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB) | Persen | 11,80 | 11,47 | 97% | BPS Kota Binjai |
| | | Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB) | Persen | 30,20 | 30,25 | 100% | BPS Kota Binjai |
| | | Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB (ADHB) | Persen | 41,70 | 33,38 | 80% | BPS Kota Binjai |
| 5 | Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya Sentra Industri Binjai | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | persen | 6,10 | 5,44 | 112% | BPS Kota Binjai |
| 6 | Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan | Indeks Pendidikan | Poin | 76,66 | 76,72 | 100% | BPS Kota Binjai |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | Sumber Data |
|----------------------------------|---|--------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) = (6)/(5) | (8) |
| 7 | Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan | Indeks Kesehatan | Poin | 83,35 | 83,77 | 101% | BPS Kota Binjai |
| 8 | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat | Indeks Pengeluaran | Poin | 78,05 | 75,76 | 97% | BPS Kota Binjai |
| Rata-rata Capaian Kinerja | | | | | | 98% | |

Keterangan:

* = Nilai realisasi menggunakan hasil pengukuran tahun-tahun sebelumnya atau angka sementara per Februari 2025.

1. Analisis Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan.

Indikator 1

Indeks Reformasi Birokrasi

Target Nilai Indikator kinerja Nilai Indeks Reformasi Birokrasi adalah Kategori B dan terealisasi dengan kategori B nilai 66,71.

Tabel 2.2

Nilai Indeks RB Pemerintah Kota Binjai

| No. | Penilaian | Bobot | Nilai |
|-----|------------|-------|--------------|
| A | RB General | 100 | 60 |
| B | RB Tematik | 20 | 6,71 |
| C | Indeks RB | 120 | 66,71 |
| | | | B |

Sumber Data: KemenpanRB Tahun 2024

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dalam rangka mencapai sasaran terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang professional.

Pemerintah Kota Binjai telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan, diantaranya:

- ✚ Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi adalah sangat baik dengan capaian 100%.

Telah ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai dan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara.

- ✚ Meningkatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Pada Tahun 2023, Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah 55,67 dengan predikat CC, yaitu implementasi akuntabilitas kinerja cukup baik. Sedangkan

berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/98/AA.05/2024 Tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 adalah 60,19 dengan predikat B, yaitu implementasi akuntabilitas kinerja baik.

Tabel 2.3
Rincian Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

| | Komponen Yang Dinilai | Bobot | Nilai | |
|---|-------------------------------|-------|-------|-------|
| | | | 2023 | 2024 |
| a | Perencanaan Kinerja | 30 | 18,17 | 20,05 |
| b | Pengukuran Kinerja | 30 | 11,74 | 12,40 |
| c | Pelaporan Kinerja | 15 | 10,06 | 10,92 |
| d | Evaluasi Kinerja | 25 | 15,70 | 16,82 |
| | Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 55,67 | 60,19 |
| | Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | CC | B |

 Meningkatkan Indeks Reformasi Hukum

Pada Tahun 2023, Indeks Reformasi Hukum Kota Binjai adalah nilai 43,82, pelaksanaan reformasi hukum masih buruk sedangkan Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kota Binjai tahun 2024 adalah 98.98 dengan kategori AA (ISTIMEWA) . Adapun rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:

| No | Variabel dan Indikator | Bobot | Nilai |
|----|---|-------|-------|
| I | Tingkat koordinasi Kementerian Hukum an HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/Memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi | 25 | 24.4 |
| 1 | Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan: a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- | 18 | 17.4 |

| | | | |
|-----|---|----|------|
| | undangan; b. Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh perancang peraturan perundang-undangan c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah | | |
| a | Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah | 6 | 5.4 |
| b | Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 6 | 6 |
| c | Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang berasal dari Kepala Daerah | 6 | 6 |
| 2 | Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan baik secara langsung atau online | 7 | 7 |
| II | Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas | 25 | 25 |
| 1 | Kebijakan pembinaan Perancang peraturan perundang-undangan | 7 | 7 |
| 2 | Keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi | 6 | 6 |
| 3 | Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang | 12 | 12 |
| III | Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reu | 30 | 28.5 |
| 1 | Kebijakan tentang analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku (existing) di tingkat daerah dalam rangka re-regulasi atau deregulasi | 8 | 8 |
| 2 | Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan di daerah yang berhasil di evaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian | 10 | 8.5 |

| | | | |
|---|--|------------|-------------|
| 3 | Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah | 6 | 6 |
| 4 | Tingkat keterlibatan pejabat fungsional Analis Hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi PUU eksiting/yang sudah berlaku di Tingkat daerah dalam rangka re-regulasi dan deregulasi | 6 | 6 |
| IV | Penataan Database Peraturan Perundang-undangan | 20 | 17 |
| 1 | Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum | 20 | 17 |
| NILAI TOTAL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM | | 100 | 94.9 |

Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat hal-hal yang masih perlu untuk diperbaiki, yakni:

| No | Variabel dan Indikator | Saran Perbaikan |
|----|--|---|
| I | Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/Memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi | |
| 1 | Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan: a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; b. Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh perancang peraturan perundang-undangan c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah | |
| a | Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah | <ul style="list-style-type: none"> Surat Permohonan harmonisasi tidak sesuai |

| | | |
|-----|---|---|
| | | (yang diupload surat permintaan anggota tim harmonisasi) |
| b | Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Di tahun berkenaan tidak ada Ranperda inisiatif DPRD yang dibahas sehingga tidak ada proses harmonisasi |
| c | Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang berasal dari Kepala Daerah | <ul style="list-style-type: none"> • lengkap |
| 2 | Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan baik secara langsung atau online | <ul style="list-style-type: none"> • Pimti hadir |
| II | Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas | |
| 1 | Kebijakan pembinaan Perancang peraturan perundang-undangan | |
| 2 | Keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi | |
| 3 | Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang | |
| III | Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu | |
| 1 | Kebijakan tentang analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku (existing) di tingkat daerah dalam rangka re-regulasi atau deregulasi | |
| 2 | Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan di daerah yang berhasil di evaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian | |
| 3 | Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah | |

| | | |
|----|--|---|
| 4 | Tingkat keterlibatan pejabat fungsional Analisis Hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi PUU eksiting/yang sudah berlaku di Tingkat daerah dalam rangka re-regulasi dan deregulasi | |
| IV | Penataan Database Peraturan Perundang-undangan | |
| 1 | Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum | <ul style="list-style-type: none"> Catatan: Nilai = 82 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-4.HN.03.05 Tahun 2024 tentang Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Tahun 2023 <p>Rekomendasi: • Tingkatkan pengelolaan JDIH sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum • Memenuhi seluruh indikator penilaian kinerja JDIH</p> |

Pada tahun Penilaian 2024 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai *Leading Institutional* IRH di level meso memberikan Apresiasi kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan Formula sebagai berikut:

**FORMULA NILAI APRESIASI
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA TAHUN 2023:**

Hasil Akhir Nilai IRH

$$f(x) = X_0 + (X_{max} - X_0) \cdot 80\%$$

Dimana :
F(x) = Nilai akhir IRH
X₀ = Nilai awal instansi
X_{max} = Nilai maximum tujuan
 Koefisien pengali = 0,8 (80%)

Dari formula di atas, hasil nilai Indeks Reformasi Hukum sebagai berikut:

| No | Penilaian | Nilai |
|----------|--------------------|--------------|
| 1 | Nilai Awal | 94.90 |
| 2 | Nilai Apresiasi | 4.08 |
| 3 | Nilai Akhir | 98.98 |

✚ Meningkatkan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Pada Tahun 2023, Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kota Binjai adalah nilai 90,72, Zona Merah Kategori A Opini Kualitas Tertinggi sedangkan berdasarkan Keputusan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 252 Tahun 2024 tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024, Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kota Binjai meningkat menjadi nilai 93,15 Zona Hijau dengan Kategori A Opini Kualitas Tertinggi.

Tabel 2.4
Rekapitulasi Hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Pemerintah Daerah Tahun 2024

| No | Unit Layanan | Dimensi Penilaian | | | | Nilai |
|----|--|-------------------|--------|--------|-----------|-------|
| | | Input | Proses | Output | Pengaduan | |
| 1 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 20,90 | 31,34 | 21,80 | 21,54 | 95,58 |
| 2 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 19,98 | 30,51 | 22,30 | 21,54 | 94,33 |
| 3 | Puskesmas Kebun Lada | 18,90 | 32,37 | 22,30 | 21,54 | 95,11 |
| 4 | Dinas Kesehatan | 20,42 | 31,03 | 22,30 | 21,54 | 95,28 |
| 5 | Dinas Pendidikan | 18,31 | 28,62 | 21,84 | 21,54 | 90,30 |
| 6 | Dinas Sosial | 20,05 | 31,03 | 22,30 | 18,97 | 92,35 |

| | | | | | | |
|------------------|------------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|
| 7 | Puskesmas Tanah Tinggi | 18,20 | 27,89 | 21,94 | 21,05 | 89,08 |
| Nilai Akhir Zona | | | | | 93,15 | |
| Kategori | | | | | A | |
| Opini | | | | | Kualitas Tertinggi | |

✚ Meningkatkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pada tahun 2023 nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Binjai adalah 2,98 dengan predikat Baik. Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Binjai meningkat menjadi 3,12 dengan predikat Baik.

Tabel 2.5
Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Utara

| No | Nama Instansi | Indeks | Predikat |
|----|------------------------------------|--------|-------------|
| 1 | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara | 3,86 | Sangat Baik |
| 2 | Pemerintah Kab. Deli Serdang | 3,57 | Sangat Baik |
| 3 | Pemerintah Kab. Karo | 3,04 | Baik |
| 4 | Pemerintah Kab. Langkat | 3,66 | Sangat Baik |
| 5 | Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah | 2,38 | Cukup |
| 6 | Pemerintah Kab. Simalungun | 2,37 | Cukup |
| 7 | Pemerintah Kab. Dairi | 2,69 | Baik |
| 8 | Pemerintah Kab. Tapanuli Utara | 2,85 | Baik |
| 9 | Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan | 3,14 | Baik |
| 10 | Pemerintah Kab. Asahan | 2,86 | Baik |
| 11 | Pemerintah Kab. Nias | 3,72 | Sangat Baik |
| 12 | Pemerintah Kab. Toba | 2,95 | Baik |
| 13 | Pemerintah Kab. Mandailing Natal | 2,89 | Baik |

| | | | |
|----|-------------------------------------|------|-------------|
| 14 | Pemerintah Kab. Nias Selatan | 2,90 | Baik |
| 15 | Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan | 2,80 | Baik |
| 16 | Pemerintah Kab. Pakpak Bharat | 2,66 | Baik |
| 17 | Pemerintah Kab. Samosir | 2,70 | Baik |
| 18 | Pemerintah Kab. Serdang Bedagai | 2,65 | Baik |
| 19 | Pemerintah Kab. Padang Lawas | 2,17 | Cukup |
| 20 | Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara | 2,26 | Cukup |
| 21 | Pemerintah Kab. Batubara | 2,67 | Baik |
| 22 | Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan | 1,93 | Cukup |
| 23 | Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara | 2,78 | Baik |
| 24 | Pemerintahan Kab. Nias Barat | 1,80 | Kurang |
| 25 | Pemerintah Kab. Nias Utara | 2,41 | Cukup |
| 26 | Pemerintah Kota Medan | 3,67 | Sangat Baik |
| 27 | Pemerintah Kota Tebing Tinggi | 3,79 | Sangat Baik |
| 28 | Pemerintah Kota Binjai | 3,12 | Baik |
| 29 | Pemerintah Kota Pematang Siantar | 3,06 | Baik |
| 30 | Pemerintah Kota Tanjung Balai | 3,24 | Baik |
| 31 | Pemerintah Kota Sibolga | 2,41 | Cukup |
| 32 | Pemerintah Kota Padangsidimpuan | 2,66 | Baik |
| 33 | Pemerintah Kota Gunung Sitoli | 2,33 | Cukup |

Meningkatkan Indeks Pelayanan Publik

Pada tahun 2023 nilai indeks Pelayanan Publik Kota Binjai adalah 2,22 dengan kategori C, sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 659 Tahun 2024 Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024, nilai Indeks Pelayanan Publik Kota Binjai 2024 adalah 4,01 dengan kategori A-.

Meningkatkan Indeks Sistem Merit

Pada tahun 2023 nilai indeks sistem merit Kota Binjai adalah 206,5 dengan kategori kurang, sedangkan berdasarkan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor:13434/B-AK.03/SD/F/2024 Hal: Penyampaian Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN Semester II Tahun 2024, nilai indeks sistem merit Kota Binjai adalah 209 dengan kategori kurang.

Pemerintah Kota Binjai perlu meningkatkan upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, antara lain:

- Perbaiki kualitas perencanaan dengan memperhatikan cascading dan crosscutting atas keterkaitan sasaran strategis yang diambil dengan satker yang terlibat dengan indikator kinerja yang berorientasi outcome dan memenuhi kriteria SMART.
- Mengimplementasikan pembangunan zona integritas terhadap PD sesuai dengan Permenpan 90 Tahun 2021
- Perlu menyusun arsitektur SPBE dalam SIA
- Perlu ada upaya untuk mendorong pemanfaatan sistem pengadaan mulai dari perencanaan hingga realisasi pengadaan (transaksional dan pencatatan) dan keterisian formasi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa.
- Melaksanakan penyusunan SKJ untuk seluruh jabatan hingga ke tahap penetapan.
- Mendorong pelaksanaan SKM pada UPP yang belum melaksanakan.
- Memastikan rencana aksi telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi pemerintah dan memastikan intervensi berupa rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan dan penganggaran, proses bisnis dan SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi dan inovasi.

Meningkatkan Indeks BerAkhlak

Pada tahun 2023 nilai Indeks BerAkhlak Kota Binjai adalah 62 dengan kategori Cukup Sehat, sedangkan berdasarkan Hasil penilaian

indeks BerAkhlak 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kota Binjai memperoleh nilai 66,2% dengan kategori Cukup Sehat.

Meningkatkan Survey Kepuasan Masyarakat

Pada tahun 2023 nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kota Binjai adalah 87,14 sedangkan Pada tahun 2024 nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kota Binjai adalah 88,50. Survey Kepuasan Masyarakat Kota Binjai sudah baik tetapi belum semua Unit Pelayanan Publik melaksanakan survey kepuasan masyarakat.

Indikator 2

Opini BPK

Berdasarkan Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 169.B/S/XVIII.MDN/05/2024 Perihal: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran (TA) 2023, Opini atas Laporan Keuangan Kota Binjai adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini tersebut didapatkan dari hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai TA. 2023 yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai dengan memberikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

BPK menemukan masih adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

dalam pengelolaan keuangan negara yang harus diperbaiki Pemerintah Kota Binjai.

Indikator 3

Indeks Profesional ASN

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dengan target 73 pada tahun 2024 mencapai realisasi 74,52 atau sebesar 102% dengan kategori **Sedang**. Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) merupakan penjumlahan dari indeks kualifikasi (bobot 25%), indeks kompetensi (bobot 40%), indeks kinerja (bobot 30%), dan Indeks Disiplin (bobot 5%).

Adapun Capaian Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Instansi
di Wilayah Kerja Kantor Regional VI BKN Medan

| No. | Instansi di Wilayah Kerja Kantor Regional VI BKN Medan | Jumlah PNS yang Diukur | Nilai Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) | | | | | Kategori |
|-----|--|------------------------|--|------------|---------|----------|-------|----------|
| | | | Kualifikasi | Kompetensi | Kinerja | Disiplin | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Pemerintah Kota Binjai | 3.681 | 21,01 | 24,92 | 23,59 | 5,00 | 74,52 | Sedang |

(Sumber data: Update Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI per 28 Februari 2025)

Indikator 4

Nilai Evaluasi LPPD

Target Nilai Indikator kinerja Nilai Evaluasi LPPD adalah nilai 3,36 dan terealisasi dengan nilai 2,6671 status sedang.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022, hasil Nilai LPPD Kota Binjai adalah 2,6671 dengan status sedang. Hal ini menunjukkan masih perlu banyak perbaikan yang harus dilakukan untuk mendorong pencapaian penyelenggaraan pemerintah Kota Binjai menjadi lebih baik ke depannya.

Beberapa faktor yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai LPPD diantaranya:

- Realisasi target kinerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Kota Binjai dan kelengkapan data pendukung Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari Perangkat Daerah terkait.
- Dilakukan Sosialisasi Penyusunan LPPD oleh Pemerintah Kota Binjai melalui Bagian Pemerintahan, yang diikuti oleh Perangkat Daerah terkait yaitu Perangkat Daerah yang mempunyai Urusan Wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan fungsi penunjang urusan Pemerintah ditambah Perangkat Daerah Pendukung (Bappeda, Bapenda, Bagian Organisasi dan Bagian Hukum), serta narasumber dari Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri.
- Dilakukan pembentukan TIM penyusunan LPPD untuk mempermudah koordinasi.

2. Analisis Sasaran Strategis 2: Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik.

Indikator 5

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Indeks kepuasan layanan infrastruktur merupakan nilai kepuasan masyarakat atas layanan infrastruktur pada suatu kota/kabupaten. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil diskusi dengan pihak penyedia pekerjaan yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai, terdapat beberapa indikator dan sub indikator yang dijadikan landasan dalam penilaian dalam kepuasan layanan infrastruktur Kota Binjai. Indikator dan sub indikator tersebut telah disusun dalam suatu kuesioner survei yang ditujukan ke masyarakat guna melihat sejauh mana kualitas layanan.

Adapun kebutuhan data dasar yakni berupa rekapitulasi dan dokumentasi data survei kepuasan masyarakat atas layanan sarana dan prasarana (infrastruktur) Kota Binjai serta data dan informasi terkait perencanaan dan realisasi pembangunan infrastruktur Kota Binjai.

Tabel 2.7
Nilai Rata – Rata Persepsi Jawaban Masyarakat Atas Layanan
Infrastruktur Berdasarkan Indikator

| NO | INDIKATOR | INFRASTRUKTUR / SUB INDIKATOR | JUMLAH NILAI JAWABAN | RATA-RATA JAWABAN | RATA- RATA JAWABAN INDIKATOR |
|-----------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1 | KETERSEDIAAN | Jalan Kota | 1677.0 | 4.2 | 4.2 |
| | | Jalan Lingkungan (Gang) | 1605.0 | 4.0 | |
| | | Jembatan | 1633.0 | 4.1 | |
| | | Sumber Air | 1704.0 | 4.3 | |
| | | Drainase | 1396.0 | 3.5 | |
| | | Jaringan Listrik | 1725.0 | 4.3 | |
| | | Jaringan Telekomunikasi Internet | 1719.0 | 4.3 | |
| | | Jaringan Telekomunikasi Seluler | 1732.0 | 4.3 | |
| | | Persampahan | 1662.0 | 4.2 | |
| | | Area Pejalan kaki (Pedestrian) | 1644.0 | 4.1 | |
| | | Taman Kota | 1703.0 | 4.3 | |
| | | Sarana Olahraga | 1661.0 | 4.2 | |
| | | Kereta Api | 1721.0 | 4.3 | |
| | | Stasiun Kereta Api | 1726.0 | 4.3 | |
| | | Angkutan Umum Dalam Kota | 1553.0 | 3.9 | |
| | | Terminal | 1619.0 | 4.0 | |
| | | Pendidikan | 1713.0 | 4.3 | |
| | | Kesehatan | 1735.0 | 4.3 | |
| | | Pasar | 1603.0 | 4.0 | |
| | | Tempat Ibadah | 1778.0 | 4.4 | |
| 2 | KUALITAS | Jalan Kota | 1682.0 | 4.2 | 4.2 |
| | | Jalan Lingkungan (Gang) | 1596.0 | 4.0 | |
| | | Jembatan | 1635.0 | 4.1 | |
| | | Sumber Air | 1676.0 | 4.2 | |
| | | Drainase | 1377.0 | 3.4 | |
| | | Jaringan Listrik | 1733.0 | 4.3 | |
| | | Jaringan Telekomunikasi Internet | 1718.0 | 4.3 | |
| | | Jaringan Telekomunikasi Seluler | 1732.0 | 4.3 | |
| | | Persampahan | 1668.0 | 4.2 | |
| | | Area Pejalan kaki (Pedestrian) | 1655.0 | 4.1 | |
| | | Taman Kota | 1703.0 | 4.3 | |
| | | Sarana Olahraga | 1649.0 | 4.1 | |
| | | Kereta Api | 1728.0 | 4.3 | |
| | | Stasiun Kereta Api | 1730.0 | 4.3 | |
| | | Angkutan Umum Dalam Kota | 1542.0 | 3.9 | |
| | | Terminal | 1622.0 | 4.1 | |

| | | | | | |
|----------|--------------------|----------------------------------|--------|-----|------------|
| | | Pendidikan | 1721.0 | 4.3 | |
| | | Kesehatan | 1734.0 | 4.3 | |
| | | Pasar | 1593.0 | 4.0 | |
| | | Tempat Ibadah | 1784.0 | 4.5 | |
| 3 | KESESUAIAN | Jalan Kota | 1667.0 | 4.2 | 4.1 |
| | | Jalan Lingkungan (Gang) | 1590.0 | 4.0 | |
| | | Jembatan | 1632.0 | 4.1 | |
| | | Sumber Air | 1677.0 | 4.2 | |
| | | Drainase | 1322.0 | 3.3 | |
| | | Jaringan Listrik | 1726.0 | 4.3 | |
| | | Jaringan Telekomunikasi Internet | 1718.0 | 4.3 | |
| | | Jaringan Telekomunikasi Seluler | 1727.0 | 4.3 | |
| | | Persampahan | 1663.0 | 4.2 | |
| | | Area Pejalan kaki (Pedestrian) | 1646.0 | 4.1 | |
| | | Taman Kota | 1694.0 | 4.2 | |
| | | Sarana Olahraga | 1649.0 | 4.1 | |
| | | Kereta Api | 1731.0 | 4.3 | |
| | | Stasiun Kereta Api | 1731.0 | 4.3 | |
| | | Angkutan Umum Dalam Kota | 1550.0 | 3.9 | |
| | | Terminal | 1623.0 | 4.1 | |
| | | Pendidikan | 1716.0 | 4.3 | |
| | | Kesehatan | 1736.0 | 4.3 | |
| | | Pasar | 1582.0 | 4.0 | |
| | | Tempat Ibadah | 1785.0 | 4.5 | |
| 4 | PEMANFAATAN | Jalan Kota | 1692.0 | 4.2 | 4.2 |
| | | Jalan Lingkungan (Gang) | 1612.0 | 4.0 | |
| | | Jembatan | 1637.0 | 4.1 | |
| | | Sumber Air | 1700.0 | 4.3 | |
| | | Drainase | 1402.0 | 3.5 | |
| | | Jaringan Listrik | 1734.0 | 4.3 | |
| | | Jaringan Telekomunikasi Internet | 1723.0 | 4.3 | |
| | | Jaringan Telekomunikasi Seluler | 1728.0 | 4.3 | |
| | | Persampahan | 1670.0 | 4.2 | |
| | | Area Pejalan kaki (Pedestrian) | 1657.0 | 4.1 | |
| | | Taman Kota | 1713.0 | 4.3 | |
| | | Sarana Olahraga | 1675.0 | 4.2 | |
| | | Kereta Api | 1739.0 | 4.3 | |
| | | Stasiun Kereta Api | 1740.0 | 4.4 | |
| | | Angkutan Umum Dalam Kota | 1566.0 | 3.9 | |
| | | Terminal | 1630.0 | 4.1 | |
| | | Pendidikan | 1738.0 | 4.3 | |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|--------|-----|-----|
| | | Kesehatan | 1738.0 | 4.3 | |
| | | Pasar | 1601.0 | 4.0 | |
| | | Tempat Ibadah | 1787.0 | 4.5 | |
| 5 | KONTRIBUSI TERHADAP KONOMI | Jalan Kota | 1693.0 | 4.2 | 4.2 |
| | | Jalan Lingkungan (Gang) | 1614.0 | 4.0 | |
| | | Jembatan | 1635.0 | 4.1 | |
| | | Sumber Air | 1708.0 | 4.3 | |
| | | Drainase | 1402.0 | 3.5 | |
| | | Jaringan Listrik | 1730.0 | 4.3 | |
| | | Jaringan Telekomunikasi Internet | 1721.0 | 4.3 | |
| | | Jaringan Telekomunikasi Seluler | 1731.0 | 4.3 | |
| | | Persampahan | 1667.0 | 4.2 | |
| | | Area Pejalan kaki (Pedestrian) | 1648.0 | 4.1 | |
| | | Taman Kota | 1713.0 | 4.3 | |
| | | Sarana Olahraga | 1662.0 | 4.2 | |
| | | Kereta Api | 1737.0 | 4.3 | |
| | | Stasiun Kereta Api | 1723.0 | 4.3 | |
| | | Angkutan Umum Dalam Kota | 1557.0 | 3.9 | |
| | | Terminal | 1627.0 | 4.1 | |
| | | Pendidikan | 1717.0 | 4.3 | |
| | | Kesehatan | 1735.0 | 4.3 | |
| | | Pasar | 1601.0 | 4.0 | |
| | | Tempat Ibadah | 1784.0 | 4.5 | |

Sumber Data: Bappeda, Laporan Akhir Indeks Kepuasan Infrastruktur Kota Binjai 2024

Tabel 2.8
Nilai Rata – Rata Persepsi Jawaban Masyarakat Atas Layanan Infrastruktur Berdasarkan Infrastruktur

| NO | INFRASTRUKTUR/SUB INDIKATOR | INDIKATOR | RATA- RATA JAWABAN | RATA-RATA JAWABAN INFRASTRUKTUR |
|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 1 | JALAN KOTA | Ketersediaan | 4.2 | 4.2 |
| | | Kualitas Fisik | 4.2 | |
| | | Kesesuaian | 4.2 | |
| | | Pemanfaatan | 4.2 | |
| | | Kontribusi Perekonomian | 4.2 | |
| 2 | JALAN LINGKUNGAN | Ketersediaan | 4.0 | 4.0 |
| | | Kualitas Fisik | 4.0 | |
| | | Kesesuaian | 4.0 | |
| | | Pemanfaatan | 4.0 | |
| | | Kontribusi Perekonomian | 4.0 | |
| 3 | JEMBATAN | Ketersediaan | 4.1 | 4.1 |
| | | Kualitas Fisik | 4.1 | |
| | | Kesesuaian | 4.1 | |

| | | | | |
|----|---|-------------------------|-----|-----|
| | | Pemanfaatan | 4.1 | |
| | | Kontribusi Perekonomian | 4.1 | |
| 4 | SUMBER AIR | Ketersediaan | 4.3 | 4.2 |
| | | Kualitas Fisik | 4.2 | |
| | | Kesesuaian | 4.2 | |
| | | Pemanfaatan | 4.3 | |
| | | Kontribusi Perekonomian | 4.3 | |
| 5 | DRAINASE | Ketersediaan | 3.5 | 3.4 |
| | | Kualitas Fisik | 3.4 | |
| | | Kesesuaian | 3.3 | |
| | | Pemanfaatan | 3.5 | |
| | | Kontribusi Perekonomian | 3.5 | |
| 6 | JARINGAN LISTRIK | Ketersediaan | 4.3 | 4.3 |
| | | Kualitas Fisik | 4.3 | |
| | | Kesesuaian | 4.3 | |
| | | Pemanfaatan | 4.3 | |
| | | Kontribusi Perekonomian | 4.3 | |
| 7 | JARINGAN TELEKOMUNIKASI INTERNET | Ketersediaan | 4.3 | 4.3 |
| | | Kualitas Fisik | 4.3 | |
| | | Kesesuaian | 4.3 | |
| | | Pemanfaatan | 4.3 | |
| | | Kontribusi Perekonomian | 4.3 | |
| 8 | JARINGAN TELEKOMUNIKASI SELULER | Ketersediaan | 4.3 | 4.3 |
| | | Kualitas Fisik | 4.3 | |
| | | Kesesuaian | 4.3 | |
| | | Pemanfaatan | 4.3 | |
| | | Kontribusi Perekonomian | 4.3 | |
| 9 | PERSAMPAHAN | Ketersediaan | 4.2 | 4.2 |
| | | Kualitas Fisik | 4.2 | |
| | | Kesesuaian | 4.2 | |
| | | Pemanfaatan | 4.2 | |
| | | Kontribusi Perekonomian | 4.2 | |
| 10 | PEDESTRIAN | Ketersediaan | 4.1 | 4.1 |
| | | Kualitas Fisik | 4.1 | |
| | | Kesesuaian | 4.1 | |
| | | Pemanfaatan | 4.1 | |
| | | Kontribusi Perekonomian | 4.1 | |
| 11 | TAMAN KOTA | Ketersediaan | 4.3 | 4.3 |
| | | Kualitas Fisik | 4.3 | |
| | | Kesesuaian | 4.2 | |
| | | Pemanfaatan | 4.3 | |
| | | Kontribusi Perekonomian | 4.3 | |
| 12 | SARANA OLAHRAGA | Ketersediaan | 4.2 | 4.1 |
| | | Kualitas Fisik | 4.1 | |
| | | Kesesuaian | 4.1 | |
| | | Pemanfaatan | 4.2 | |
| | | Kontribusi Perekonomian | 4.2 | |
| 13 | KERETA API | Ketersediaan | 4.3 | 4.3 |
| | | Kualitas Fisik | 4.3 | |
| | | Kesesuaian | 4.3 | |
| | | Pemanfaatan | 4.3 | |

| | | | | |
|----|--------------------------|-------------------------|-----|-----|
| | | Kontribusi Perekonomian | 4.3 | |
| 14 | STASIUN KERETA API | Ketersediaan | 4.3 | 4.3 |
| | | Kualitas Fisik | 4.3 | |
| | | Kesesuaian | 4.3 | |
| | | Pemanfaatan | 4.4 | |
| | | Kontribusi Perekonomian | 4.3 | |
| 15 | ANGKUTAN UMUM DALAM KOTA | Ketersediaan | 3.9 | 3.9 |
| | | Kualitas Fisik | 3.9 | |
| | | Kesesuaian | 3.9 | |
| | | Pemanfaatan | 3.9 | |
| | | Kontribusi Perekonomian | 3.9 | |
| 16 | TERMINAL | Ketersediaan | 4.0 | 4.1 |
| | | Kualitas Fisik | 4.1 | |
| | | Kesesuaian | 4.1 | |
| | | Pemanfaatan | 4.1 | |
| | | Kontribusi Perekonomian | 4.1 | |
| 17 | PENDIDIKAN | Ketersediaan | 4.3 | 4.3 |
| | | Kualitas Fisik | 4.3 | |
| | | Kesesuaian | 4.3 | |
| | | Pemanfaatan | 4.3 | |
| | | Kontribusi Perekonomian | 4.3 | |
| 18 | KESEHATAN | Ketersediaan | 4.3 | 4.3 |
| | | Kualitas Fisik | 4.3 | |
| | | Kesesuaian | 4.3 | |
| | | Pemanfaatan | 4.3 | |
| | | Kontribusi Perekonomian | 4.3 | |
| 19 | PASAR | Ketersediaan | 4.0 | 4.0 |
| | | Kualitas Fisik | 4.0 | |
| | | Kesesuaian | 4.0 | |
| | | Pemanfaatan | 4.0 | |
| | | Kontribusi Perekonomian | 4.0 | |
| 20 | TEMPAT IBADAH | Ketersediaan | 4.4 | 4.5 |
| | | Kualitas Fisik | 4.5 | |
| | | Kesesuaian | 4.5 | |
| | | Pemanfaatan | 4.5 | |
| | | Kontribusi Perekonomian | 4.5 | |

Sumber Data: Bappeda, Laporan Akhir Indeks Kepuasan Infrastruktur Kota Binjai 2024

Tabel 2.9
Capaian Nilai IKLI (Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur) Berdasarkan Indikator IKLI

| NO | INDIKATOR | RATA-RATA JAWABAN INDIKATOR | CAPAIAN INDIKATOR | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN (PREDIKAT) |
|----|--------------|-----------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1 | Ketersediaan | 4.2 | 83.3 | Baik | B |
| 2 | Kualitas | 4.2 | 83.2 | Baik | B |
| 3 | Kesesuaian | 4.1 | 82.9 | Baik | B |
| 4 | Pemanfaatan | 4.2 | 83.7 | Baik | B |

| | | | | | |
|---|-----------------------------|-----|------|------|---|
| 5 | Kontribusi Terhadap Ekonomi | 4.2 | 83.5 | Baik | B |
|---|-----------------------------|-----|------|------|---|

Sumber Data: Bappeda, Laporan Akhir Indeks Kepuasan Infrastruktur Kota Binjai 2024

Tabel 2.10
Capaian Nilai IKLI (Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur) Berdasarkan Infrastruktur

| NO | INDIKATOR | RATA-RATA JAWABAN INDIKATOR | CAPAIAN INDIKATOR | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN (PREDIKAT) |
|----|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1 | Jalan Kota | 4.2 | 84.11 | Sangat Baik | A |
| 2 | Jalan Lingkungan | 4,0 | 80,17 | Baik | B |
| 3 | Jembatan | 4,1 | 81,72 | Baik | B |
| 4 | Sumber Air | 4,2 | 84,65 | Sangat Baik | A |
| 5 | Drainase | 3,4 | 68,99 | Baik | B |
| 6 | Jaringan Listrik | 4,3 | 86,48 | Sangat Baik | A |
| 7 | Jaringan Telekomunikasi Internet | 4,3 | 85,99 | Sangat Baik | A |
| 8 | Jaringan Telekomunikasi Seluler | 4,3 | 86,5 | Sangat Baik | A |
| 9 | Persampahan | 4,2 | 83,3 | Baik | B |
| 10 | Pedestrian | 4,1 | 82,5 | Baik | B |
| 11 | Taman Kota | 4,3 | 85,26 | Sangat Baik | A |
| 12 | Sarana Olahraga | 4,1 | 82,96 | Baik | B |
| 13 | Kereta Api | 4,3 | 86,56 | Sangat Baik | A |
| 14 | Stasiun Kereta Api | 4,3 | 86,5 | Sangat Baik | A |
| 15 | Angkutan Umum Dalam Kota | 3,9 | 77,68 | Baik | B |
| 16 | Terminal | 4,1 | 81,21 | Baik | B |
| 17 | Pendidikan | 4,3 | 85,87 | Sangat Baik | A |
| 18 | Kesehatan | 4,3 | 86,78 | Sangat Baik | A |
| 19 | Pasar | 4,0 | 79,8 | Baik | B |
| 20 | Tempat Ibadah | 4,5 | 89,18 | Sangat Baik | A |

Sumber Data: Bappeda, Laporan Akhir Indeks Kepuasan Infrastruktur Kota Binjai 2024

Nilai IKLI (Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur) secara keseluruhan dapat menghitung perolehan rata - rata capaian setiap indikator IKLI. Berdasarkan perolehan rata – rata capaian indikator IKLI maka dapat dilihat perolehan skor nilai indeks IKLI pada tabel berikut ini.

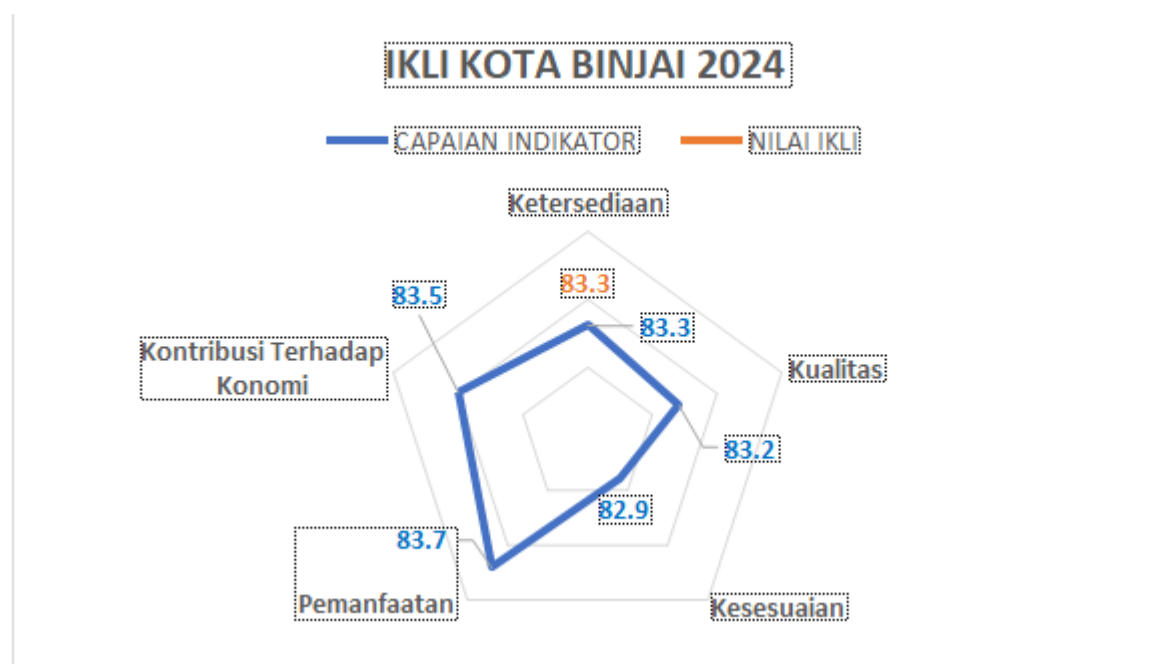
Tabel 2.11
Nilai IKLI (Indeks layanan Infrastruktur) Kota Binjai

| NO | INDIKATOR | RATA- RATA JAWABAN INDIKATOR | CAPAIAN INDIKATOR | NILAI IKLI | KINERJA UNIT PELAYANAN (PREDIKAT) |
|----|-----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1 | Ketersediaan | 4.2 | 83.3 | 83,3 | B |
| 2 | Kualitas | 4.2 | 83.2 | | |
| 3 | Kesesuaian | 4.1 | 82.9 | | |
| 4 | Pemanfaatan | 4.2 | 83.7 | | |
| 5 | Kontribusi Terhadap Ekonomi | 4.2 | 83.5 | | |

Sumber Data: Bappeda, Laporan Akhir Indeks Kepuasan Infrastruktur Kota Binjai 2024

Untuk melihat capaian indikator IKLI terhadap nilai IKLI dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.1
NILAI IKLI KOTA BINJAI



Sumber Data: Bappeda, Laporan Akhir Indeks Kepuasan Infrastruktur Kota Binjai 2024

perolehan nilai IKLI (Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur) Kota Binjai saat ini sebesar 83,3 indeks. Artinya Kota Binjai memiliki mutu pelayanan infrastruktur dengan predikat B dan kinerja pelayanannya “Baik”.

Pemerintah Kota Binjai berkomitmen untuk terus memperbaiki layanan infrastruktur Kota Binjai, Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan berdasarkan saran dan persepsi yang telah di berikan masyarakat.

Indikator 6

Persentase Kondisi Jalan Baik

Target persentase kondisi jalan baik Kota Binjai adalah 94% dan terealisasi 90%.

Sampai tahun 2024 panjang jalan di Binjai mencapai 362.83 km, dengan rincian panjang jalan di Kecamatan Binjai Selatan 103.869 km, Kecamatan Binjai Kota 32.113 km, Kecamatan Binjai Timur, 83.516 km, Kecamatan Binjai Utara 84.832 km, dan Kecamatan Binjai Barat 58.501 km.

Kondisi jalan di Kota Binjai yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah dikarenakan kondisi rusak dan rusak berat sepanjang 35,28 km atau 10 persen dari total jalan di Kota Binjai.

Tabel 2.12
Panjang Jalan Menurut Status Jalan di Kota Binjai, 2024

| Uraian | Jalan Negara State Road (km) | Jalan Provinsi Provincial Road (km) | Jalan Kota City Road (km) |
|---|------------------------------------|---|---------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 Jenis Permukaan/ Type of Surface | | | |
| a. Diaspal/ Asphaltized | - | - | 356,43 |
| b. Kerikil/ Gravel | - | - | 3,85 |
| c. Tanah/ Land | - | - | 1,37 |
| d. Tidak dirinci | - | - | 1,18 |
| Jumlah | - | - | 362,83 |
| 2 Kondisi jalan/ Road Status | | | |
| a. Baik/ Good | - | - | 303,57 |
| b. Sedang/ Fair | - | - | 23,98 |
| c. Rusak/ Bad | - | - | 27,93 |
| d. Rusak Berat/ Very Bad | - | - | 7,35 |
| Jumlah | - | - | 362,83 |
| 3 Kelas jalan | | | |
| Kelas I | - | - | - |
| kelas II | - | - | - |
| Kelas III | - | - | - |
| Kelas tidak dirinci | - | - | - |

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai

Target persentase akses air minum kota adalah 98,05% dan terealisasi 100%.

Tabel 2.13
Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Sumber Air Utama yang digunakan Rumah Tangga untuk Minum di Kota Binjai, 2024

| Karakteristik | Sumber Air Utama untuk Minum | | | Jumlah |
|---------------------------------|--|--|----------------------|---------------|
| | Air Kemasan Bermerk/ Air Isi Ulang/ Leding | Sumur Bor/ Pompa/ Sumur Terlindung/ Mata Air Terlindung/ Air Hujan | Lainnya ¹ | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Jenis Kelamin KRT | | | | |
| Laki-laki | 63.09 | 36.27 | NA | 100.00 |
| Perempuan | 68.19 | 31.81 | 0.00 | 100.00 |
| Kelompok Pengeluaran | | | | |
| 40 Persen Terbawah | 53.79 | 46.21 | 0.00 | 100.00 |
| 40 Persen Menengah | 65.78 | 32.80 | NA | 100.00 |
| 20 Persen Teratas | 74.46 | 25.54 | 0.00 | 100.00 |
| Pendidikan Tertinggi KRT | | | | |
| SD ke bawah | 58.16 | 41.84 | 0.00 | 100.00 |
| SMP ke atas | 64.87 | 34.42 | NA | 100.00 |
| Kota Binjai | 63.62 | 35.80 | NA | 100.00 |

Catatan: ¹ Lainnya termasuk sumur tak terlindung, mata air tak terlindung, air permukaan (sungai/danau/waduk/kolam/irigasi), dan lainnya.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Sumber Data: BPS Kota Binjai, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Binjai 2024

Tabel 2.14
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama Untuk Minum/Mandi/Cuci/dll di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai, 2024

| Sumber Air Minum/Mandi/Cuci/dll | Sumatera Utara | Binjai |
|---|----------------|--------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. Air kemasan/isi ulang/leding | 30,02 | 63,62 |
| 2. Sumur bor/pompa/sumur terlindung/mata air terlindung/air hujan | 69,99 | 35,80 |
| 3. Lainnya | 0 | 0,58 |

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024

Sumber Data: BPS Kota Binjai, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Binjai 2024

Sebagian besar rumah tangga di Kota Binjai menggunakan sumber utama untuk mandi/cuci/dll dari air kemasan/isi ulang/leding yaitu mencapai 63,62 persen dan sumur bor/pompa/sumur terlindung/mata air terlindung/air hujan 35,80 persen. Di Provinsi Sumatera Utara, persentase rumah tangga yang menggunakan sumber sumur bor/pompa/sumur terlindung/mata air terlindung/air hujan (69,99 persen) lebih banyak dibandingkan Kota Binjai, berbeda dengan penggunaan air kemasan/isi ulang/leding dimana penggunaannya di Kota Binjai lebih banyak (63,62 persen).

3. Analisis Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Indikator 8

Indeks Lingkungan Hidup

Target Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Pemerintah Kota Binjai adalah 59,00 poin dan berdasarkan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.274/SET PPKL/PEHKT/DTN.02/B/12/2024 Hal: Penyampaian Hasil Nilai IKLH Tahun 2024, IKLH Kota Binjai terealisasi pada nilai 60,81poin.

Tabel 2.15
Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Binjai

| | Komponen Indeks Yang Dihitung | Nilai | | Kategori |
|---|--|-------|-------|----------|
| | | 2023 | 2024 | |
| a | Indeks Kualitas Air (IKA) | 50,00 | 53,33 | sedang |
| b | Indeks Kualitas Udara (IKU) | 87,96 | 88,51 | baik |
| c | Indeks Kualitas Lahan (IKL) | 22,39 | 22,4 | kurang |
| | Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 59,33 | 60,81 | sedang |

Pelaksanaan perhitungan kualitas air dilakukan dengan melakukan pengujian sampel baku mutu air sungai yang ada di Kota Binjai yakni di 3 sungai (Sungai Bingei, Sungai Bangkatan dan Sungai Mencirim). Ada sebanyak 20 parameter yang di ukur dari sampel yang di ambil, yang kemudian diinput di aplikasi IKLH Kementerian Lingkungan Hidup. Indeks Kualitas Air sebesar 53,33 poin, hasil ini meningkat dari nilai tahun 2023 (50,00 poin). tetapi masih ada di bawah target yakni 54,01

poin.

Pelaksanaan perhitungan kualitas udara dilakukan dengan metode pasif sampler yang di 4 lokasi mewakili wilayah pemukiman, perkantoran, industri dan transportasi. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai Indeks Kualitas Udara sebesar 88,51 poin yang artinya meningkat dari tahun 2023 (87,96 poin).

Pelaksanaan perhitungan kualitas lahan dilakukan dengan menggunakan citra satelit yaitu luas tutupan hutan dan luas tutupan vegetasi non hutan. Dari hasil perhitungan diperoleh Indeks Kualitas Lahan sebesar 22,40 poin yang mana ada sedikit kenaikan dibanding tahun 2023 (22,39 poin) tetapi masih ada di bawah target yakni 28,85 poin dikarenakan Kota Binjai tidak memiliki tutupan lahan berupa hutan.

Dari pelaksanaan perhitungan tiga parameter indeks diatas, maka di dapatlah nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Binjai sebesar 60,81 poin. Nilai ini merupakan peningkatan dibanding tahun 2023 (59,33 poin).

Untuk kedepannya perlu dioptimalkan dan ditingkatkan kapasitas dan kompetensi Laboratorium lingkungan dan Sumber daya aparatur yang memadai agar menghasilkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang optimal.

4. Analisis Sasaran Strategis 4: Meningkatnya peranan sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan.

Indikator 9

Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)

Target Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB) adalah 11,80% dan terealisasi 11,47%.

Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.16

Kinerja Urusan Industri Tahun 2019 s.d 2023

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB | 11,08 | 11,12 | 11,45 | 11,61 | 11,47 | 11,47 |

Sumber Data: BPS, Kota Binjai Dalam Angka 2025

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Binjai menunjukkan angka yang stabil pada tahun 2023 dan tahun 2024, yaitu berada pada poin 11,47.

Pembangunan urusan industri diarahkan untuk menumbuhkan kembangkan industri secara intensif dengan mengutamakan industri/usaha kecil dan menengah melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia.

Adapun jumlah industri dan potensi unggulan industri yang ada di Binjai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.17**Jumlah Industri Kecil dan Menengah Menurut Kecamatan di Kota Binjai, 2022–2024**

| Kecamatan District | Jumlah Industri Total Industry | | |
|-----------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Binjai Selatan | 79 | 109 | 87 |
| Binjai Kota | 90 | 99 | 48 |
| Binjai Timur | 127 | 177 | 35 |
| Binjai Utara | 213 | 258 | 59 |
| Binjai Barat | 241 | 135 | 43 |
| Kota Binjai | 750 | 778 | 272 |

Sumber Data: BPS, Kota Binjai Dalam Angka 2025

Terdapat penambahan 272 Industri Kecil dan Menengah yang ada di Kota Binjai, jadi total Industri Kecil dan Menengah Kota Binjai adalah 1.050.

Catatan: *angka 272 yang terdapat dalam Binjai Dalam Angka 2025 merupakan jumlah penambahan Industri Kecil dan Menengah, bukan merupakan akumulatif semua Industri Kecil dan Menengah di Kota Binjai.

Tabel 2.18
Potensi Produk Unggulan Industri di Kota Binjai, 2024

| Jumlah Industri <i>Production Type</i> | | Satuan <i>Unit</i> | Jumlah Produksi <i>Total Production</i> |
|---|--|-----------------------|--|
| (1) | | (2) | (3) |
| 1 | Ayaman Bambu Woven Bamboo | Buah/Unit | 35.488 |
| 2 | Sulaman Bordir Embroidered Edge | Buah/Piece | 25.060 |
| 3 | Mebel Bambu Furniture of Bamboo | Set/Set | 1.420 |
| 4 | Barang- Barang dari Tekstil Textile Goods | Buah/Sheet | 30.030.023 |
| 5 | Kerupuk/Opak Crackers | Kg/ Kilogram | 106.136 |
| 6 | Tenun Weaving | Helai/ Sheet | 656 |

Sumber Data: BPS, Kota Binjai Dalam Angka 2025

Indikator 10

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)

Target Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB) adalah 30,20% dan terealisasi 30,25%.

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.19
Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2018 s.d 2023

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB | 29,12 | 29,17 | 29,60 | 30,24 | 30,28 | 30,25 |

Sumber Data: BPS, Kota Binjai Dalam Angka 2025

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Binjai terus meningkat dari 29,12 % pada tahun 2019 menjadi 30,28 % pada tahun 2023. Tetapi mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 30,25. Potensi pengembangan sektor perdagangan harus bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Binjai yang bisa melalui peningkatan pelayanan maupun kualitas sarana prasarana pendukung sehingga akan bisa meningkatkan produktivitas pelaku dunia perdagangan yang akan

memberikan sumbangan tambahan terhadap kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Binjai.

Adapun jumlah pasar, luas areal dan jumlah pedagang yang ada di Kota Binjai adalah sebagai berikut:

Tabel 2.20
Jumlah Pasar, Luas Areal, dan Jumlah Pedagang Menurut Kecamatan di Kota Binjai, 2024

| Kecamatan <i>District</i> | Banyak Pasar <i>Market</i> | Luas Areal <i>Area (m²)</i> | Pedagang Lokal | Pedagang Non Lokal |
|------------------------------|-------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Binjai Selatan | 1 | 19.295 | - | - |
| Binjai Kota | 9 | 90.335 | 2.000 | 140 |
| Binjai Timur | - | - | - | - |
| Binjai Utara | 1 | 1.000 | 200 | 51 |
| Binjai Barat | 1 | 1.500 | 20 | 60 |
| Kota Binjai | 12 | 112.130 | 2.220 | 251 |

Sumber Data: BPS, Kota Binjai Dalam Angka 2025

Indikator 11

Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB (ADHB)

Target Kontribusi Sektor jasa terhadap PDRB (ADHB) adalah 41,5% dan terealisasi 33,38%.

Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.21
Kinerja Urusan Jasa Tahun 2019 s.d 2024

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kontribusi sektor Jasa terhadap PDRB | 33,32 | 33,13 | 32,46 | 32,66 | 32,91 | 33,38 |

Sumber Data: BPS, Kota Binjai Dalam Angka 2025

Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB Kota Binjai mengalami peningkatan mulai dari 33,32% pada tahun 2019 menjadi 33,38% pada tahun 2023.

Secara keseluruhan perekonomian Kota Binjai tahun 2024 tumbuh sebesar 4,66 persen, menurun dibanding dengan tahun 2023 sebesar 4,75 persen.

Tabel 2.22
Distribusi PDRB Kota Binjai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2020 – 2024 (Persen)

| Lapangan Usaha/Industry | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i> | 3,02 | 2,98 | 2,98 | 3,00 | 3,04 |
| B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i> | 2,82 | 2,84 | 2,78 | 2,67 | 2,47 |
| C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i> | 11,12 | 11,45 | 11,61 | 11,47 | 11,47 |
| D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i> | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
| E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i> | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| F Konstruksi/ <i>Construction</i> | 12,40 | 12,45 | 12,08 | 12,04 | 11,79 |
| G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor vehicles and Motorcycles</i> | 29,17 | 29,60 | 30,24 | 30,28 | 30,25 |
| H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i> | 7,60 | 7,34 | 7,54 | 8,03 | 8,12 |
| I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i> | 5,02 | 4,85 | 5,08 | 5,37 | 5,66 |
| J Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i> | 2,64 | 2,75 | 2,74 | 2,68 | 2,68 |
| K Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance</i> | 3,30 | 3,44 | 3,58 | 3,47 | 3,34 |
| L Real Estate/ <i>Real Estate Activities</i> | 8,10 | 7,97 | 7,86 | 7,41 | 7,37 |
| M,N Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i> | 0,87 | 0,84 | 0,87 | 0,89 | 0,88 |
| O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence, Compulsory Social Security</i> | 7,29 | 6,93 | 6,39 | 6,48 | 6,74 |
| P Jasa Pendidikan/ <i>Education</i> | 4,75 | 4,69 | 4,45 | 4,41 | 4,37 |

| | | | | | | |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i> | 1,12 | 1,09 | 1,05 | 1,05 | 1,06 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i> | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 0,53 |
| | Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Grass Regional Domestic Product</i> | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber Data: BPS, Kota Binjai Dalam Angka 2025

1. Analisis Sasaran Strategis 5: Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya Setra Industri Binjai.

Indikator 12

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Target tingkat pengangguran terbuka adalah 6,10% dan terealisasi 5,44%.

Pengangguran yang dianggap paling serius untuk diatasi adalah pengangguran terbuka, yaitu bagian dari angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mereka yang tidak punya pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 di Binjai sebesar 5,44 persen, menurun dibanding tahun 2023 (6,10 persen).

TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Misal: TPT sebesar 5 persen, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 5 orang merupakan pengangguran.

Tingkat Pengangguran Terbuka terus mengalami penurunan pada kurun tahun 2021-2024. Hal ini sejalan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terus mengalami kenaikan pada kurun tahun 2022-2024.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Binjai terus menurun tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan,

Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai dalam meningkatkan penempatan dan perluasan kesempatan kerja, diantaranya:

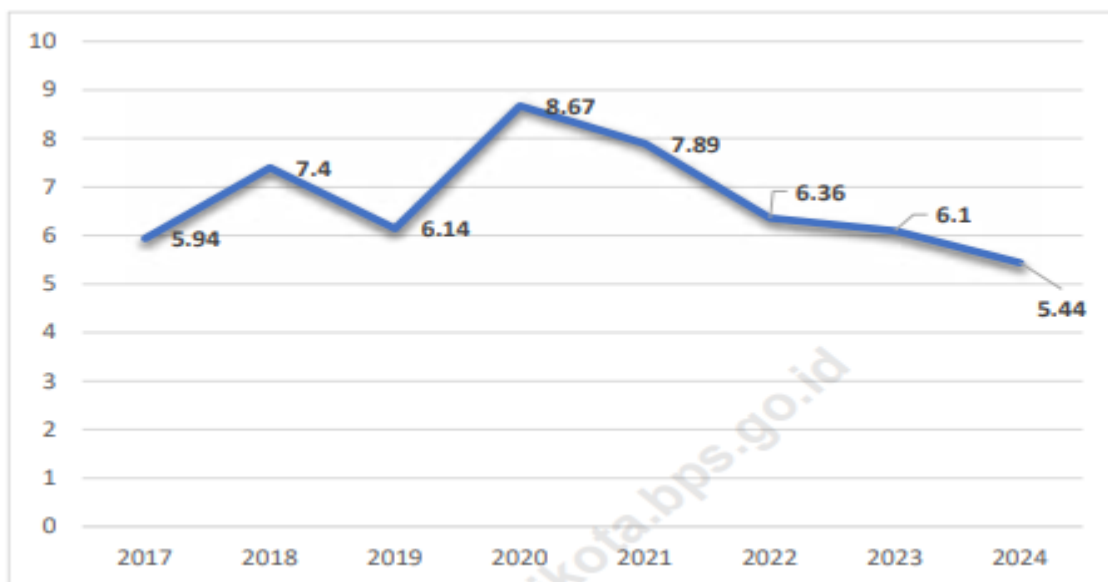
Kerjasama yang dibina oleh Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai dengan Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagai lembaga yang berperan dalam membantu pencari kerja dan perusahaan dalam mencari karyawan, BKK juga membantu menanamkan jiwa wirausaha pada para lulusannya. BKK biasanya dibentuk di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan satuan pendidikan tinggi.

Kerja sama dengan perusahaan *Outsourcing* yang ada di Batam dalam perekrutan tenaga kerja sebagai karyawan di PT. Philips Batam.

Menjalin kerja sama dan koordinasi dalam melaksanakan perekrutan karyawan dengan perusahaan local seperti Alfamart, Indomaret, BTPN Syariah dan PT. Harmony Binjai.

Melaksanakan Job Fair atau bursa kerja yang mempertemukan langsung perusahaan dengan pencari kerja.

Grafik 2.2
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Binjai, 2017-2024



Sumber Data: BPS Kota Binjai, Kota Binjai Dalam Angka 2025

Tabel 2.23
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Binjai, 2016-2024

| Tahun Years | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja <i>Economically Active Participation Rate</i> | Tingkat Pengangguran Terbuka <i>Unemployment Rate</i> |
|----------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 2016 | - | - |
| 2017 | 62,03 | 5,94 |
| 2018 | 66,78 | 7,40 |
| 2019 | 66,89 | 6,14 |
| 2020 | 65,14 | 8,67 |
| 2021 | 62,77 | 7,86 |
| 2022 | 54,89 | 6,36 |
| 2023 | 62,79 | 6,10 |
| 2024 | 64,22 | 5,44 |

Sumber Data: BPS Kota Binjai, Kota Binjai Dalam Angka 2025



Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Binjai pada tahun 2024 mencapai 78,67, meningkat 0,56 poin dari tahun sebelumnya.

Sebelum menghitung IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksinya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} - I_{minRLS}}{2}$$

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(PPP) - \ln(PPP_{min})}{\ln(PPP_{maks}) - \ln(PPP_{min})}$$

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam Tabel

Tabel 2.24
Nilai Minimum dan Maksimum Komponen Penyusun IPM

| Komponen IPM | Satuan | Minimum | Maksimum |
|------------------------------|--------|-----------|------------|
| Angka Harapan Hidup (AHH) | Tahun | 20 | 85 |
| Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | Tahun | 0 | 15 |
| Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 0 | 18 |
| Pengeluaran per Kapita | Rupiah | 1.007.436 | 26.572.352 |

Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

Perkembangan pembangunan manusia Kota Binjai secara umum menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. IPM Kota Binjai tahun 2020 sebesar 76,45 terus meningkat menjadi 78,67 pada tahun 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa IPM Kota Binjai terus tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,7 persen per tahun. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kota Binjai tahun 2024 mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2024 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

Tabel 2.25**Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Indeks Pembangunan Manusia Kota Binjai, 2014 - 2024**

| Tahun Year | Umur Harapan Hidup Life Expectancy | Harapan Lama Sekolah Expected years of schooling | Rata-rata Lama Sekolah Mean years of schooling | IPM Human Development Indicess |
|---------------|--|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2014 | 71,39 | 13,00 | 9,77 | 72,55 |
| 2015 | 71,59 | 13,56 | 10,28 | 73,81 |
| 2016 | 71,67 | 13,57 | 10,28 | 74,11 |
| 2017 | 71,75 | 13,58 | 10,58 | 74,65 |
| 2018 | 71,95 | 13,59 | 10,75 | 75,21 |
| 2019 | 72,25 | 13,61 | 10,77 | 75,89 |
| 2020 | 72,38 | 13,62 | 10,93 | 75,89 |
| 2021 | 72,45 | 13,63 | 10,94 | 76,01 |
| 2022 | 72,79 | 13,87 | 11,18 | 76,95 |
| 2023 | 74,18 | 14,17 | 11,19 | 78,11 |
| 2024 | 74,45 | 14,18 | 11,20 | 78,67 |

Sumber Data: BPS Kota Binjai, Kota Binjai Dalam Angka 2025

Capaian IPM merupakan agregasi dari tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator angka harapan hidup saat lahir. Rata-rata bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup di Kota Binjai pada tahun 2024 mencapai usia 74,45 tahun.

Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Secara rata-rata, penduduk 25 tahun ke atas di Kota Binjai telah menempuh pendidikan hingga 11,20 tahun atau setara dengan mencapai SMA kelas 11. Sementara anak berusia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan mampu bersekolah hingga 14,18 tahun atau mencapai Diploma II.

Tidak kalah penting yaitu dimensi standar hidup layak yang diukur melalui indikator rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Daya beli masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam

membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan Kota Binjai sebesar 15,640 juta rupiah per tahun.

5. Analisis Sasaran Strategis 6: Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan.

Indikator 14

Indeks Pendidikan

Target Nilai Indikator kinerja Nilai Indeks Pendidikan adalah 76,66 dan terealisasi 76,72.

Rata-rata lama sekolah (RLS/MYS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan.

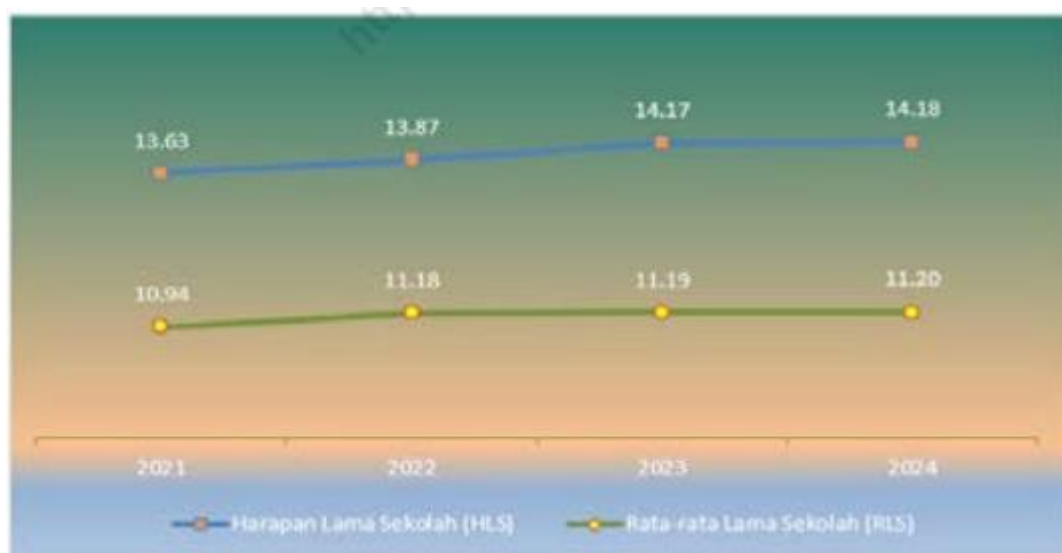
Pada tahun 2024, rata-rata lama sekolah penduduk dewasa di Kota Binjai sebesar 11,20 tahun, yang berarti secara umum penduduk di Kota Binjai sudah duduk di kelas sebelas SMA. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan penduduk usia sekolah (7 tahun atau lebih) di Kota Binjai dapat menyelesaikan sekolah hanya sampai kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Atas (SMA) /Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah. Hal ini menunjukkan telah tercapainya target rata-rata lama bersekolah 9 tahun. Oleh karena itu, selain menjadikan hal ini sebagai Pekerjaan Rumah dan tanggung jawab bersama untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, juga menjadi masukan dalam menyusun arah kebijakan dan strategi pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Sehingga arah komunikasi pembangunan lebih dapat tersampaikan dengan baik.

Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Harapan lama sekolah Kota Binjai pada tahun 2024 sebesar 14,18 tahun. Artinya bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 11,89 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan di perguruan tinggi (tepatnya kuliah semester III).

Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa arah pembangunan pendidikan di Kota Binjai sudah tepat, yaitu memberikan akses dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Kota Binjai yang lebih berkualitas.

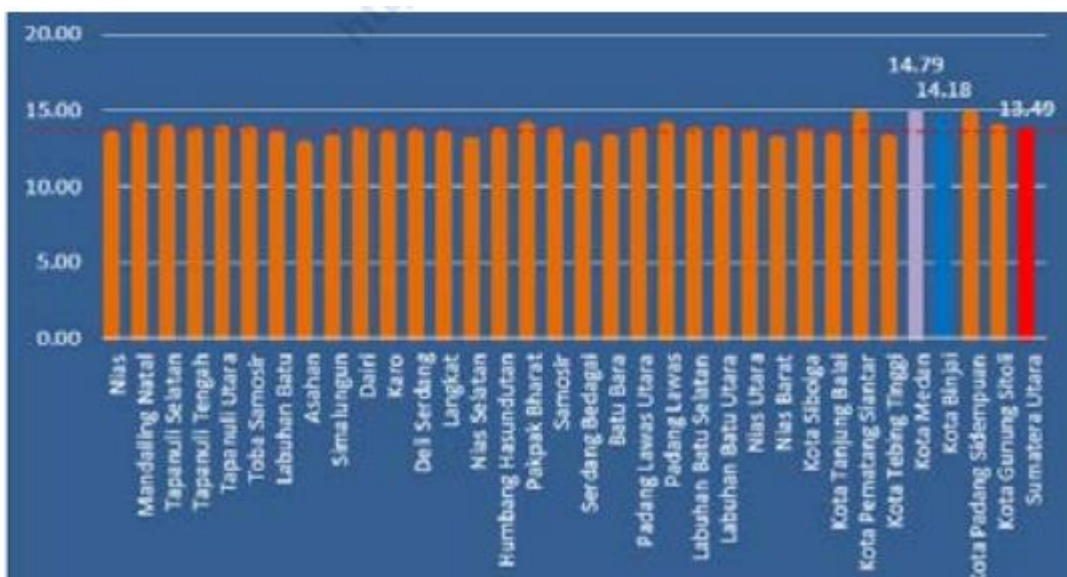
Grafik 2.3
Perkembangan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kota Binjai, 2021 – 2024



Sumber Data: BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kota Binjai 2024

Harapan lama sekolah tertinggi tahun 2024 di Provinsi Sumatera Utara adalah Kota Medan sebesar 14,79 tahun. Harapan lama sekolah terendah di Provinsi Sumatera Utara adalah Kabupaten Asahan dan Kabupaten Serdang Berdagai sebesar 12,65 tahun. Sedangkan, harapan lama sekolah Kota Binjai pada tahun 2024 sebesar 14,18 tahun, selisih 0,61 poin dengan Kota Medan dan lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka Provinsi Sumatera Utara yang secara umum sebesar 13,49 tahun. Kota Binjai menempati urutan ke-4 (empat) bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Utara.

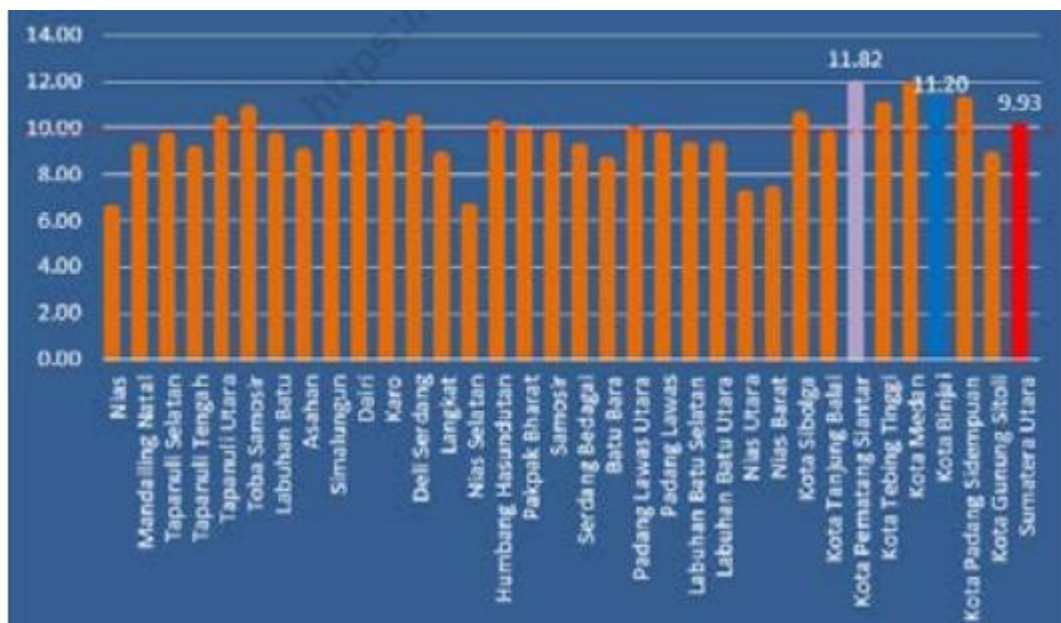
Grafik 2.4
Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Utara, 2024



Sumber Data: BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kota Binjai 2024

Rata-rata lama sekolah penduduk terlama di Provinsi Sumatera Utara adalah Kota Pematang Siantar sebesar 11,82 tahun, sedangkan Kota Medan menempati posisi kedua mencapai 11,79 tahun. Sedangkan, Kabupaten Nias menduduki peringkat terakhir dengan rata-rata lama sekolah sebesar 6,40 tahun. Angka rata-rata lama sekolah pada Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 sebesar 9,93 tahun dimana 1,27 tahun lebih cepat bila dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah Kota Binjai secara umum. Secara umum rata-rata lama sekolah penduduk Kota Binjai menduduki ranking ke-3 (ke-tiga) di antara kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Utara.

Grafik 2.5
Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Utara, 2024



Sumber Data: BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kota Binjai 2024

6. Analisis Sasaran Strategis 7: Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan.

Indikator 15

Indeks Kesehatan

Target Indeks Kesehatan Kota Binjai adalah 83,35 dan terealisasi 83,77.

Indeks Kesehatan menggambarkan dimensi dari umur panjang dan hidup sehat. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator angka harapan hidup saat lahir. Rata-rata bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup di Kota Binjai pada tahun 2024 mencapai usia 74,45 tahun. Berarti setiap bayi di Kota Binjai yang dilahirkan pada tahun 2024, dapat berharap untuk hidup sampai usia 74,45 tahun. Selama tahun 2021-2024, umur harapan hidup saat lahir di Kota Binjai tumbuh rata-rata 0,30 persen per tahun.

Sumber daya manusia secara keseluruhan dapat dipandang dari aspek fisik dan non fisik yang tentunya keduanya saling berkaitan. Kualitas fisik penduduk dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Salah satu indikator utama dalam mengukur derajat kesehatan penduduk secara makro adalah umur harapan hidup waktu lahir. Umur

harapan hidup ini memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara makro. Kebijakan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, diharapkan dapat meningkatkan umur harapan penduduk. Semakin tinggi umur harapan hidup menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat secara makro semakin tinggi.

Grafik 2.6
Perkembangan Umur Harapan Hidup Kota Binjai, 2021 – 2024



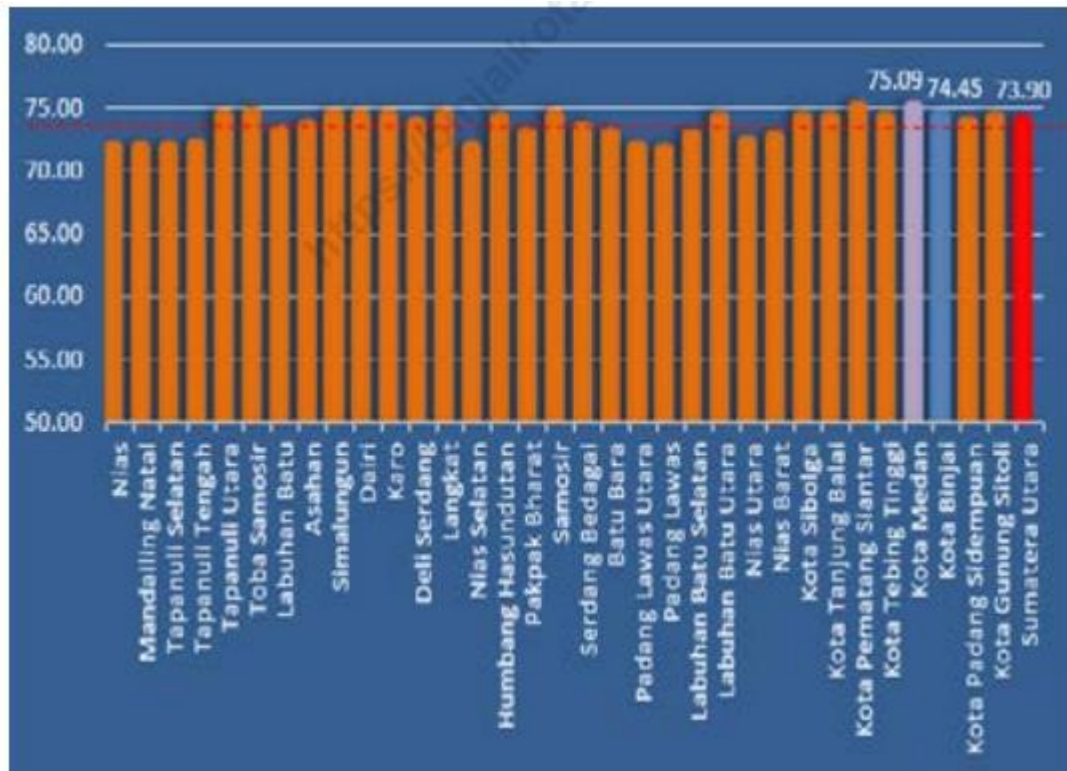
Sumber Data: BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kota Binjai 2024

Kecenderungan meningkatnya angka harapan hidup ini disebabkan membaiknya pelayanan kesehatan dan peningkatan kondisi sosial ekonomi, sehingga memungkinkan terjadinya perbaikan gizi serta kesehatan dan lingkungan hidup yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan angka harapan hidup.

Umur harapan hidup tertinggi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 adalah Kota Medan sebesar 75,09 tahun, sedangkan terendah adalah Kabupaten Padang Lawas sebesar 71,67 tahun. Umur harapan hidup penduduk Kota Binjai tercatat 74,45 tahun. Bila dibandingkan dengan kondisi Provinsi Sumatera Utara secara umum, penduduk Sumatera Utara secara umum mempunyai peluang untuk

hidup 0,55 tahun lebih pendek dari penduduk Kota Binjai. Umur harapan hidup Kota Binjai tahun 2024 menempati peringkat ke-4 (keempat) di antara seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Grafik 2.7
Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/kota
Provinsi Sumatera Utara, 2024



Sumber Data: BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kota Binjai 2024

7. Analisis Sasaran Strategis 8: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Indikator 16

Indeks Pengeluaran

Target Nilai Indikator kinerja Nilai Indeks Pengeluaran adalah 78,05 dan terealisasi 75,76.

Tahun 2024, pengeluaran per kapita penduduk Kota Binjai telah mencapai 12,02 juta per tahun. Pada Tahun 2021 tingkat daya beli masyarakat Kota Binjai sebesar 11,06 juta rupiah per kapita per tahun, meningkat menjadi 11,36 juta rupiah per kapita per tahun pada tahun 2022. Kemampuan daya beli masyarakat Kota Binjai selama periode 2021-2024 terus meningkat, dengan rata-rata pertumbuhan periode

2021-2024 sekitar 2,24 persen per tahun.

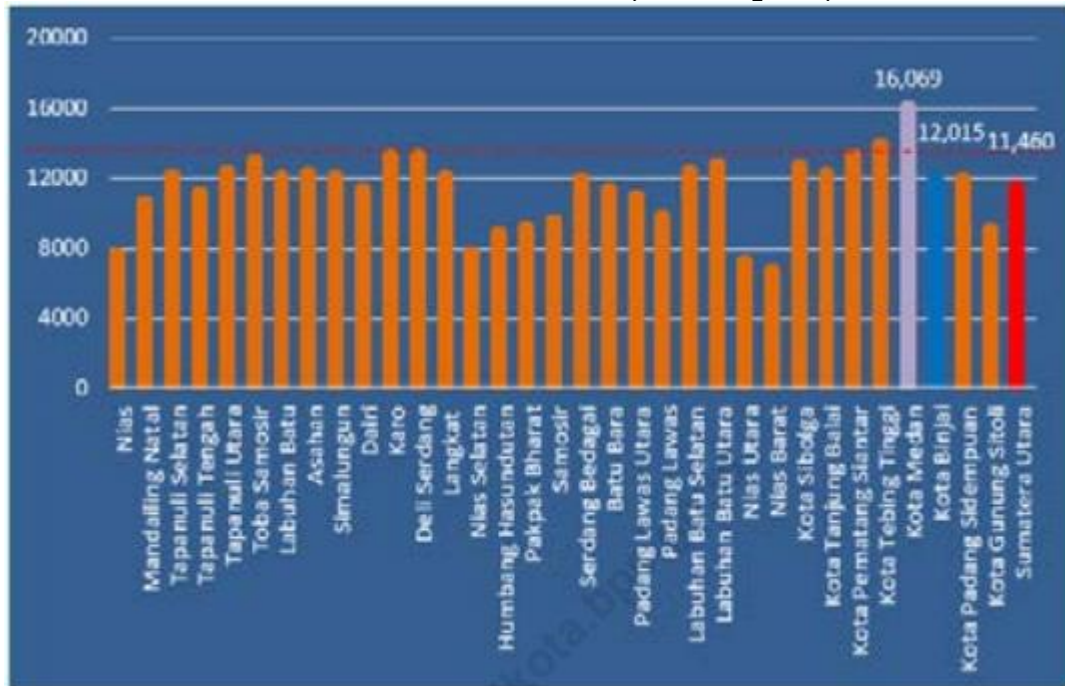
Grafik 2.8
Perkembangan Pengeluaran per Kapita per Tahun Kota Binjai, 2021-2024 (juta rupiah)



Sumber Data: BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kota Binjai 2024

Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan tertinggi Kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 adalah Kota Medan sebesar 16.069 ribu rupiah, dan terendah adalah Kabupaten Nias Barat sebesar 6.740 ribu rupiah. Sedangkan, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan Kota Binjai adalah 12.015 ribu rupiah pada tahun 2024. Untuk daya beli penduduk Kota Binjai pada tahun 2024 masih lebih tinggi dari penduduk Sumatera Utara pada umumnya yaitu sebesar 11.460 ribu rupiah. Dari gambar 3.5 dapat dilihat daya beli Kota Binjai menempati urutan ke18 (ke delapan belas) dari seluruh kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Grafik 2.9
Pengeluaran per Kapita (d disesuaikan) Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara, 2024 (ribu rupiah)



Sumber Data: BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kota Binjai 2024

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2023 dan 2022

Sesuai Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, salah satu informasi yang harus disampaikan pada Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja ini adalah Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan tahun 2022. Perbandingan kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel:

Tabel 2.26 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2023 dan 2022

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian (%) | Realisasi 2023 | Realisasi 2022 |
|-----|---|---------------------------------------|----------|-------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) = (6)/(5) | (8) | (9) |
| 1 | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan | Indeks Reformasi Birokrasi | Kategori | B | B | 100 | B | C |
| | | Opini BPK | Opini | WTP | WTP | 100 | WTP | WDP |
| | | Indeks Profesionalitas ASN | Poin | 73,00 | 74,52* | 102 | 72,56 | 44,01* |
| | | Nilai Evaluasi LPPD | Poin | 3,36 | 2,6671* | 79 | 2,32* | 3,2185* |
| 2 | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur | Nilai | 83 (B) | 83,3 (B) | 100 | 78 (B) | 80* |
| | | Persentase kondisi jalan baik | Persen | 94,00 | 90,00 | 96 | 83,00 | 84.63 |
| | | Persentase akses air minum kota | Persen | 98,05 | 100 | 102 | 98,05 | 98.79 |
| 3 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Poin | 61,00 | 60,81 | 99,69% | 59,33 | 65.85 |
| 4 | Meningkatnya peranan | Kontribusi Sektor Industri | Persen | 11,80 | 11,47 | 97% | 11,47 | 11.61 |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian (%) | Realisasi 2023 | Realisasi 2022 |
|-----|---|--|--------|-------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) = (6)/(5) | (8) | (9) |
| | sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan | terhadap PDRB (ADHB) | | | | | | |
| | | Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB) | Persen | 30,20 | 30,25 | 100% | 30,28 | 30.24 |
| | | Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB (ADHB) | Persen | 41,70 | 33,38 | 80% | 32,99 | 32.66 |
| 5 | Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya Sentra Industri Binjai | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | persen | 6.10 | 5,44 | 112% | 6,10 | 7.86 |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|------|-------|-------|-----|-------|-------|
| 6 | Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan | Indeks Pendidikan | Poin | 76,66 | 76,72 | 100 | 76,66 | 75,79 |
|---|--|-------------------|------|-------|-------|-----|-------|-------|

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian (%) | Realisasi 2023 | Realisasi 2022 |
|-----|---|--------------------|--------|-------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) = (6)/(5) | (8) | (9) |
| 7 | Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan | Indeks Kesehatan | Poin | 83,35 | 83,77 | 101 | 83,35 | 81,22 |
| 8 | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat | Indeks Pengeluaran | Poin | 78,05 | 75,76 | 97 | 74,58 | (74,03) |

Keterangan:

* = Nilai realisasi menggunakan hasil pengukuran tahun-tahun sebelumnya atau angka sementara per february 2025.

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan jangka menengah/RPJMD

Sesuai Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, salah satu informasi yang harus disampaikan pada Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja ini adalah Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan jangka menengah/ RPJMD.

Berikut ini adalah Tabel penjabaran target dan capaian Kinerja Tahun 2024 dengan RPJMD Kota Binjai Tahun 2021- 2026:

Tabel 2.27 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan jangka menengah/RPJMD

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian (%) | Target 2026 (RPJMD 2021-2026) |
|-----|---|---------------------------------------|----------|-------------|----------------|---------------|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) = (6)/(5) | (8) |
| 1 | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan | Indeks Reformasi Birokrasi | Kategori | B | B | 100 | BB |
| | | Opini BPK | Opini | WTP | WTP | 100 | WTP |
| | | Indeks Profesionalitas ASN | Poin | 73,00 | 74,52* | 102 | 81 |
| | | Nilai Evaluasi LPPD | Poin | 3,36 | 2,6671* | 79 | 3,40 |
| 2 | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur | Nilai | 83 (B) | 83,3 (B) | 100 | 80 |
| | | Persentase kondisi jalan baik | Persen | 94,00 | 90,00 | 96 | 96 |
| | | Persentase akses air minum kota | Persen | 98,05 | 100 | 102 | 60 |
| 3 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Poin | 61,00 | 60,81 | 99,69% | 68,7 |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian (%) | Target 2026 (RPJMD 2021-2026) |
|-----|---|--|--------|-------------|----------------|------------------|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) = (6)/(5) | (8) |
| 4 | Meningkatnya peranan sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan | Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB) | Persen | 11,80 | 11,47 | 97% | 12,0 |
| | | Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB) | Persen | 30,20 | 30,25 | 100% | 30,7 |
| | | Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB (ADHB) | Persen | 41,70 | 33,38 | 80% | 42 |
| 5 | Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya Sentra Industri Binjai | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | persen | 6.10 | 5,44 | 112% | 6,0 |
| 6 | Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Poin | 76,66 | 76,72 | 100 | 79,10 |
| | | Indeks Pendidikan | Poin | 75.74 | 76,66 | 101 | 76,96 |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian (%) | Target 2026 (RPJMD 2021-2026) |
|-----|---|--------------------|--------|-------------|----------------|------------------|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) = (6)/(5) | (8) |
| 7 | Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan | Indeks Kesehatan | Poin | 83,35 | 83,77 | 101 | 82,68 |
| 8 | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat | Indeks Pengeluaran | Poin | 78,05 | 75,76 | 97 | 81,43 |

Keterangan:

* = Nilai realisasi menggunakan hasil pengukuran tahun-tahun sebelumnya atau angka sementara per Februari 2025.

d. **Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/provinsi**

penjabaran realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional/provinsi dapat dilihat pada tabel 2.25

Tabel 2.28 Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan standar nasional/provinsi

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi 2024 | Standar Nasional/Provinsi | Capaian (%) |
|-----|---|---------------------------------------|----------|----------------|---------------------------|-------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan | Indeks Reformasi Birokrasi | Kategori | B | BB | 86% |
| | | Opini BPK | Opini | WTP | WTP | 100% |
| | | Indeks Profesionalitas ASN | Poin | 74,52* | 71,53 | 104% |
| | | Nilai Evaluasi LPPD | Poin | 2,6671* | 2,9354* | 91% |
| 2 | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur | Nilai | 83,3 (B) | 79 | 105% |
| | | Persentase kondisi jalan baik | Persen | 90,00 | 73 | 123% |
| | | Persentase akses air minum kota | Persen | 100 | 92,94 | 108% |
| 3 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Poin | 60,81 | 72,81 | 84% |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi 2024 | Standar Nasional/Provinsi | Capaian (%) |
|-----|---|--|--------|----------------|---------------------------|-------------|
| 4 | Meningkatnya peranan sektor industri ekonomikreatif, jasa dan perdagangan | Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB) | Persen | 11,47 | 18,36 | 62% |
| | | Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB) | Persen | 30,25 | 18,79 | 161% |
| | | Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB (ADHB) | Persen | 33,38 | 19,52 | 171% |
| 5 | Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya Sentra Industri Binjai | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | persen | 5,44 | 5,60 | 103% |
| 6 | Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Poin | 76,72 | 75,76 | 101% |
| | | Indeks Pendidikan | Poin | 76,66 | 70,57 | 109% |
| 7 | Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan | Indeks Kesehatan | Poin | 83,77 | 82,92 | 101% |
| 8 | Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat | Indeks Pengeluaran | Poin | 75,76 | 74,30 | 102% |

Keterangan:

* = Nilai realisasi menggunakan hasil pengukuran tahun-tahun sebelumnya atau angka sementara per Februari 2025.

= Standar yang digunakan merupakan capaian provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Berdasarkan Update Data Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI tanggal 28 Februari 2024 perihal Hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Instansi di wilayah Kerja Kantor Regional BKN, Kota Binjai berada di peringkat ke-7 dari 34 daerah Kota/Kabupaten se Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.29
Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Instansi
di Wilayah Kerja Kantor Regional VI BKN Medan

| Jumlah Instansi | Instansi di Wilayah Kerja Kantor Regional VI BKN Medan | Jumlah PNS yang Diukur | Nilai Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) | | | | | Kategori |
|-----------------|---|------------------------|--|------------|---------|----------|-------|----------|
| | | | Kualifikasi | Kompetensi | Kinerja | Disiplin | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 34 Instansi | Nilai Rata-rata Instansi wilayah Kerja Kantor Regional VI BKN Medan | 3.681 | 21,01 | 24,92 | 23,59 | 5,00 | 74,52 | Sedang |

| No. | Instansi di Wilayah Kerja Kantor Regional VI BKN Medan | Kategori | Jumlah PNS yang Diukur | Nilai Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) | | | | |
|-----|--|---------------|------------------------|--|------------|---------|----------|-------|
| | | | | Kualifikasi | Kompetensi | Kinerja | Disiplin | Nilai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara | Sedang | 21.183 | 21,35 | 24,61 | 20,58 | 5 | 71,53 |
| 2 | Pemerintah Kab. Deli Serdang | Rendah | 9.211 | 21,03 | 23,75 | 20,18 | 5 | 69,96 |
| 3 | Pemerintah Kab. Karo | Rendah | 4.376 | 20,88 | 20,01 | 16,31 | 5 | 62,2 |
| 4 | Pemerintah Kab. Langkat | Sedang | 7.212 | 20,63 | 26,21 | 23,07 | 5 | 74,9 |
| 5 | Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah | Sangat Rendah | 4.249 | 20,35 | 17,79 | 13,46 | 4,99 | 56,58 |
| 6 | Pemerintah Kab. Simalungun | Rendah | 7.101 | 20,4 | 22,77 | 20,11 | 5 | 68,28 |
| 7 | Pemerintah Kab. Labuhanbatu | Rendah | 4.155 | 21,25 | 19,32 | 16,31 | 5 | 61,88 |
| 8 | Pemerintah Kab. Dairi | Sangat Rendah | 3.866 | 19,95 | 15,54 | 10,21 | 5 | 50,7 |
| 9 | Pemerintah Kab. Tapanuli Utara | Rendah | 4.155 | 20,49 | 21,35 | 18,53 | 5 | 65,37 |
| 10 | Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan | Rendah | 3.539 | 20,62 | 23,04 | 20,37 | 5 | 69,04 |

| No. | Instansi di Wilayah Kerja Kantor Regional VI BKN Medan | Kategori | Jumlah PNS yang Diukur | Nilai Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) | | | | |
|-----|--|---------------|------------------------|--|------------|---------|----------|-------|
| | | | | Kualifikasi | Kompetensi | Kinerja | Disiplin | Nilai |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Pemerintah Kab. Asahan | Sangat Rendah | 5.010 | 20,3 | 15,72 | 11,22 | 5 | 52,23 |
| 12 | Pemerintah Kab. Nias | Sedang | 2.489 | 20,87 | 27,04 | 23,98 | 4,99 | 76,88 |
| 13 | Pemerintah Kab. Toba | Rendah | 3.293 | 21,07 | 20,04 | 17,11 | 5 | 63,22 |
| 14 | Pemerintah Kab. Mandailing Natal | Sangat Rendah | 5.343 | 20,48 | 17,19 | 12,88 | 5 | 55,55 |
| 15 | Pemerintah Kab. Nias Selatan | Sangat Rendah | 3.216 | 20,54 | 10,84 | 7,38 | 5 | 43,86 |
| 16 | Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan | Rendah | 3.444 | 21 | 21,6 | 18,56 | 5 | 66,16 |
| 17 | Pemerintah Kab. Pakpak Bharat | Sangat Rendah | 2.106 | 21,16 | 14,27 | 10,36 | 4,99 | 50,78 |
| 18 | Pemerintah Kab. Samosir | Sedang | 2.732 | 21,09 | 23,59 | 21,39 | 5 | 71,06 |
| 19 | Pemerintah Kab. Serdang Bedagai | Sedang | 4.346 | 20,67 | 25,01 | 22,08 | 5 | 72,76 |
| 20 | Pemerintah Kab. Padang Lawas | Sangat Rendah | 3.262 | 20,56 | 13,96 | 8,37 | 5 | 47,89 |
| 21 | Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara | Rendah | 3.366 | 20,43 | 22,97 | 20,16 | 5 | 68,56 |
| 22 | Pemerintah Kab. Batubara | Sangat Rendah | 3.482 | 21,23 | 13,68 | 8,67 | 5 | 48,58 |
| 23 | Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan | Sedang | 2.582 | 21,04 | 24,68 | 22,07 | 5 | 72,79 |
| 24 | Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara | Sedang | 3.138 | 20,52 | 28,03 | 24,8 | 5 | 78,34 |
| 25 | Pemerintah Kab. Nias Barat | Sangat Rendah | 1.843 | 21,32 | 17,37 | 14,03 | 5 | 57,72 |
| 26 | Pemerintah Kab. Nias Utara | Sedang | 2.343 | 20,95 | 24,49 | 23,22 | 4,98 | 73,64 |
| 27 | Pemerintah Kota Medan | Sedang | 9.613 | 21,7 | 25,5 | 24,73 | 5 | 76,92 |
| 28 | Pemerintah Kota Tebing Tinggi | Sangat Rendah | 2.549 | 21,72 | 15,05 | 12,01 | 5 | 53,78 |
| 29 | Pemerintah Kota Binjai | Sedang | 3.681 | 21,01 | 24,92 | 23,59 | 5 | 74,52 |
| 30 | Pemerintah Kota Pematang Siantar | Sedang | 3.555 | 21,25 | 26,33 | 23,42 | 5 | 75,6 |

| No. | Instansi di Wilayah Kerja Kantor Regional VI BKN Medan | Kategori | Jumlah PNS yang Diukur | Nilai Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) | | | | |
|-----|--|---------------|------------------------|--|------------|---------|----------|-------|
| | | | | Kualifikasi | Kompetensi | Kinerja | Disiplin | Nilai |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31 | Pemerintah Kota Tanjungbalai | Sedang | 2.341 | 21,08 | 28,42 | 25,48 | 4,99 | 79,97 |
| 32 | Pemerintah Kota Sibolga | Sangat Rendah | 2.062 | 21,27 | 18,07 | 16,24 | 5 | 60,58 |
| 33 | Pemerintah Kota Padangsidempuan | Sangat Rendah | 2.848 | 21,28 | 18,34 | 16,37 | 5 | 60,99 |
| 34 | Pemerintah Kota Gunung Sitoli | Rendah | 2.249 | 21,22 | 21,66 | 20,52 | 5 | 68,4 |

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022, Kota Binjai berada pada peringkat ke 18 dari 33 daerah Kota/Kabupaten se Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 2.1
Hasil LPPD Pemerintah Daerah Tahun 2023

| KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA | | | |
|---|-------------------------------|--------|---------------|
| Kode | Kabupaten/Kota | Skor | Status |
| 12.01 | Kabupaten Tapanuli Tengah | 2,6002 | Rendah |
| 12.02 | Kabupaten Tapanuli Utara | 3,1472 | Sedang |
| 12.03 | Kabupaten Tapanuli Selatan | 2,9786 | Sedang |
| 12.04 | Kabupaten Nias | 2,7418 | Sedang |
| 12.05 | Kabupaten Langkat | 2,3865 | Rendah |
| 12.06 | Kabupaten Karo | 2,8341 | Sedang |
| 12.07 | Kabupaten Deli Serdang | 3,0680 | Sedang |
| 12.08 | Kabupaten Simalungun | 2,2579 | Rendah |
| 12.09 | Kabupaten Asahan | 2,8650 | Sedang |
| 12.10 | Kabupaten Labuhanbatu | 2,3071 | Rendah |
| 12.11 | Kabupaten Dairi | 2,2810 | Rendah |
| 12.12 | Kabupaten Toba | 2,7069 | Sedang |
| 12.13 | Kabupaten Mandailing Natal | 2,2962 | Rendah |
| 12.14 | Kabupaten Nias Selatan | 1,8943 | Rendah |
| 12.15 | Kabupaten Pakpak Bharat | 2,6823 | Sedang |
| 12.16 | Kabupaten Humbang Hasundutan | 2,9861 | Sedang |
| 12.17 | Kabupaten Samosir | 2,3338 | Rendah |
| 12.18 | Kabupaten Serdang Bedagai | 3,1483 | Sedang |
| 12.19 | Kabupaten Batubara | 2,9385 | Sedang |
| 12.20 | Kabupaten Padang Lawas Utara | 2,5897 | Rendah |
| 12.21 | Kabupaten Padang Lawas | 2,0773 | Rendah |
| 12.22 | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | 2,0532 | Rendah |
| 12.23 | Kabupaten Labuhanbatu Utara | 2,7552 | Sedang |
| 12.24 | Kabupaten Nias Utara | 1,6150 | Sangat Rendah |
| 12.25 | Kabupaten Nias Barat | 1,4539 | Sangat Rendah |
| 12.71 | Kota Medan | 3,5095 | Tinggi |

| Kode | Kabupaten/Kota | Skor | Status |
|-------|----------------------|--------|--------|
| 12.72 | Kota Pematangsiantar | 2,0321 | Rendah |
| 12.73 | Kota Sibolga | 2,6619 | Sedang |
| 12.74 | Kota Tanjungbalai | 2,8723 | Sedang |
| 12.75 | Kota Binjai | 2,6671 | Sedang |
| 12.76 | Kota Tebing Tinggi | 3,3358 | Sedang |
| 12.77 | Kota Padangsidempuan | 2,9158 | Sedang |
| 12.78 | Kota Gunungsitoli | 2,7833 | Sedang |

Berdasarkan berdasarkan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.274/SET PPKL/PEHKT/DTN.02/B/12/2024 Hal: Penyampaian Hasil Nilai IKLH Tahun 2024, IKLH Kota Binjai terealisasi pada nilai 60,81poin, untuk Kota Binjai di tingkat provinsi Sumatera Utara berada di peringkat 28 dari 33 Kabupaten/Kota.

Gambar 2.2
Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024
Se Kabupaten/Kota Sumatera Utara

| | | | | | | |
|----|----------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|
| 24 | Kabupaten Asahan | Sumatera Utara | 58.57 | 87.21 | 33.2 | 64.61 |
| 25 | Kabupaten Batubara | Sumatera Utara | 50 | 87.71 | 25.27 | 59.86 |
| 26 | Kabupaten Dairi | Sumatera Utara | 70 | 94.26 | 58.16 | 77.23 |
| 27 | Kabupaten Deli Serdang | Sumatera Utara | 57.2 | 87.03 | 31.86 | 63.73 |
| 28 | Kabupaten Humbang Hasundutan | Sumatera Utara | 56.67 | 91.47 | 71.74 | 74.06 |
| 29 | Kabupaten Karo | Sumatera Utara | 59.23 | 93.37 | 52.47 | 71.58 |
| 30 | Kabupaten Labuhanbatu | Sumatera Utara | 63.33 | 94.62 | 25.05 | 67.62 |
| 31 | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | Sumatera Utara | 70 | 93.47 | 27.88 | 70.28 |
| 32 | Kabupaten Labuhanbatu Utara | Sumatera Utara | 52.22 | 91.99 | 33.71 | 64.27 |
| 33 | Kabupaten Langkat | Sumatera Utara | 67 | 91.91 | 54.9 | 74.44 |

| NO | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI | IKA | IKU | IKL | IKLH |
|----|------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|
| 34 | Kabupaten Mandailing Natal | Sumatera Utara | 58.08 | 95.61 | 66.88 | 75.2 |
| 35 | Kabupaten Nias | Sumatera Utara | 67.93 | 94.11 | 46.16 | 73.77 |
| 36 | Kabupaten Nias Barat | Sumatera Utara | 53.33 | 92.86 | 32.55 | 64.79 |
| 37 | Kabupaten Nias Selatan | Sumatera Utara | 60 | 94.86 | 66.69 | 75.58 |
| 38 | Kabupaten Nias Utara | Sumatera Utara | 56.67 | 93.35 | 34.46 | 66.66 |
| 39 | Kabupaten Padang Lawas | Sumatera Utara | 50 | 91.02 | 54.12 | 67.52 |
| 40 | Kabupaten Padang Lawas Utara | Sumatera Utara | 63.33 | 92.07 | 41.33 | 70.15 |
| 41 | Kabupaten Pakpak Barat | Sumatera Utara | 0 | 97.07 | 92.4 | 59.55 |
| 42 | Kabupaten Samosir | Sumatera Utara | 53.64 | 93.9 | 58.17 | 70.93 |
| 43 | Kabupaten Serdang Bedagai | Sumatera Utara | 53.2 | 93.39 | 24.19 | 63.13 |
| 44 | Kabupaten Simalungun | Sumatera Utara | 53.33 | 95.62 | 36.96 | 66.87 |
| 45 | Kabupaten Tapanuli Selatan | Sumatera Utara | 67.42 | 95.83 | 62.86 | 77.93 |
| 46 | Kabupaten Tapanuli Tengah | Sumatera Utara | 69 | 95.8 | 52.65 | 76.27 |
| 47 | Kabupaten Tapanuli Utara | Sumatera Utara | 70 | 94.75 | 76.89 | 81.53 |
| 48 | Kabupaten Toba | Sumatera Utara | 54.62 | 96.17 | 64.05 | 73.51 |
| 49 | Kota Binjai | Sumatera Utara | 53.33 | 88.51 | 22.4 | 60.81 |
| 50 | Kota Gunung Sitoli | Sumatera Utara | 0 | 95.86 | 35.66 | 46.63 |
| 51 | Kota Medan | Sumatera Utara | 62.88 | 80.38 | 34.41 | 63.73 |
| 52 | Kota Padang Sidempuan | Sumatera Utara | 63.33 | 89.69 | 25.21 | 65.66 |
| 53 | Kota Pematang Siantar | Sumatera Utara | 70 | 88.65 | 22.44 | 67.14 |
| 54 | Kota Sibolga | Sumatera Utara | 0 | 92.14 | 46.23 | 47.44 |
| 55 | Kota Tanjung Balai | Sumatera Utara | 55.71 | 90.98 | 27.4 | 63.8 |
| 56 | Kota Tebing Tinggi | Sumatera Utara | 50 | 88.99 | 24.71 | 60.25 |

Berdasarkan data BPS yang termuat dalam Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Binjai adalah lebih kecil 0,16 persen dari Provinsi Sumatera Utara. Untuk Kota Binjai di tingkat provinsi Sumatera Utara berada di peringkat 20 dari 33 Kabupaten/Kota.

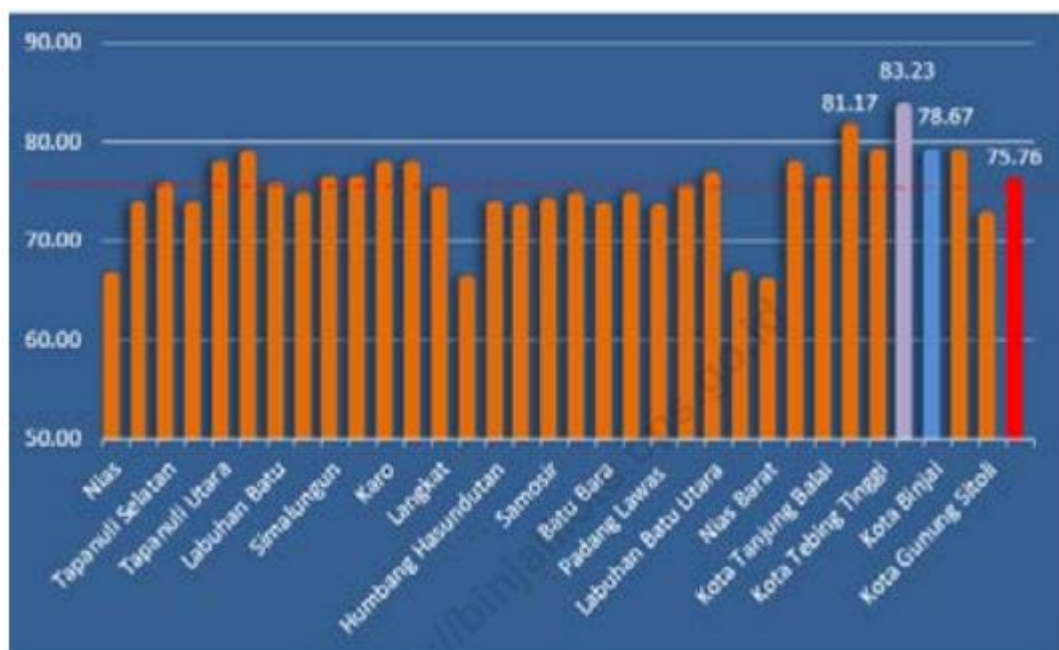
Tabel 2.30
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2022- 2024

| Kabupaten/Kota Regency/Municipality | TPT/UR | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2022 | 2023 | | 2024 | |
| | Agt Aug | Feb Feb | Agt Aug | Feb Feb | Agt Aug |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Kabupaten/Regency | | | | | |
| 01 Nias | 2,81 | – | 2,31 | – | 2,10 |
| 02 Mandailing Natal | 7,64 | – | 7,45 | – | 7,22 |
| 03 Tapanuli Selatan | 3,65 | – | 3,49 | – | 3,41 |
| 04 Tapanuli Tengah | 7,97 | – | 7,81 | – | 7,45 |
| 05 Tapanuli Utara | 1,07 | – | 1,03 | – | 1,21 |
| 06 Toba | 1,39 | – | 1,30 | – | 1,09 |
| 07 Labuhanbatu | 6,90 | – | 5,99 | – | 5,90 |
| 08 Asahan | 6,26 | – | 6,12 | – | 5,94 |
| 09 Simalungun | 5,51 | – | 5,35 | – | 5,17 |
| 10 Dairi | 0,88 | – | 1,23 | – | 1,43 |
| 11 Karo | 2,71 | – | 2,63 | – | 2,40 |
| 12 Deli Serdang | 8,79 | – | 8,62 | – | 8,02 |
| 13 Langkat | 6,88 | – | 6,33 | – | 6,08 |
| 14 Nias Selatan | 3,69 | – | 3,48 | – | 3,03 |
| 15 Humbang Hasundutan | – | – | 0,84 | – | 0,92 |
| 16 Pakpak Bharat | – | – | 0,45 | – | 0,97 |
| 17 Samosir | 1,16 | – | 1,03 | – | 0,89 |
| 18 Serdang Bedagai | 4,98 | – | 4,97 | – | 4,88 |
| 19 Batu Bara | 6,21 | – | 5,88 | – | 5,75 |
| 20 Padang Lawas Utara | 4,31 | – | 4,42 | – | 3,99 |
| 21 Padang Lawas | 5,90 | – | 5,75 | – | 5,47 |
| 22 Labuhanbatu Selatan | 3,15 | – | 3,43 | – | 3,24 |
| 23 Labuhanbatu Utara | 3,75 | – | 4,84 | – | 4,60 |
| 24 Nias Utara | 2,59 | – | 2,57 | – | 2,82 |
| 25 Nias Barat | – | – | 0,80 | – | 1,00 |
| Kota/Municipality | | | | | |
| 71 Sibolga | 7,05 | – | 6,79 | – | 6,52 |
| 72 Tanjungbalai | 4,62 | – | 4,47 | – | 4,08 |
| 73 Pematangsiantar | 9,36 | – | 8,62 | – | 8,00 |
| 74 Tebing Tinggi | 6,39 | – | 6,24 | – | 6,18 |
| 75 Medan | 8,89 | – | 8,67 | – | 8,13 |
| 76 Binjai | 6,36 | – | 6,10 | – | 5,44 |
| 77 Padang Sidempuan | 7,76 | – | 7,57 | – | 7,17 |
| 78 Gunungsitoli | 3,65 | – | 3,67 | – | 3,30 |
| Sumatera Utara | 6,16 | 5,24 | 5,89 | 5,10 | 5,60 |

Sumber Data: BPS, Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2025

Berdasarkan data BPS yang termuat dalam Indeks Pembangunan Manusia Kota Binjai 2024, Indeks Pembangunan Kota Binjai berada di urutan ke 4 dari seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Utara. Indeks Pendidikan Kota Binjai lebih besar 0,85 poin dari Indeks Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, sedangkan untuk Indeks Kesehatan Kota Binjai lebih besar 6,15 poin dari Indeks Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Begitupun dengan Indeks Pengeluaran Kota Binjai lebih besar 4,37 poin dari Indeks Pengeluaran Provinsi Sumatera Utara.

Grafik 2.10
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara, 2024



Sumber Data: BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kota Binjai 2024

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Dalam standar pengukuran nasional, suatu kinerja dikatakan berhasil jika rata-rata capaian indikator kinerja pada sasaran tersebut berada di atas 90% dari yang ditargetkan. Dan jika dilihat dari capaian kinerja yang disajikan pada tabel maka 8 (delapan) sasaran dapat dikatakan berhasil dikarenakan rata-rata capaian indikator pada sasaran tersebut berada di atas 90%. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.31
Sasaran dengan rata-rata capaian indikator di atas 90%

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | Rata-rata capaian indikator Sasaran |
|-----|--|----------------------------|--------|-----------|------------------|-------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (5)/(4) | (7) |
| | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan | Indeks Reformasi Birokrasi | B | B | 100% | |
| | | Opini BPK | WTP | WTP | 100% | |

| | | | | | | |
|---|---|--|-------|----------|--------|--------|
| 1 | | Indeks Profesionalitas ASN | 73,00 | 74,52* | 102% | 95% |
| | | Nilai Evaluasi LPPD | 3,36 | 2,6671* | 79% | |
| 2 | Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Publik | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur | 83(B) | 83,3 (B) | 100% | 99% |
| | | Persentase Kondisi Jalan Baik | 94,00 | 90 | 96% | |
| | | Persentase akses air minum kota | 98,05 | 100 | 100% | |
| 3 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 61,00 | 60,81 | 99,69% | 99,69% |
| 4 | Meningkatnya peranan sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan | Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB) | 11.80 | 11.47 | 97% | 92 |
| | | Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB) | 30,20 | 30.25 | 100% | |
| | | Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB (ADHB) | 41.70 | 33,38 | 80% | |
| 5 | Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya Sentra Industri Binjai | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 6,10 | 5,44 | 112% | 112% |
| 6 | Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan | Indeks Pendidikan | 76,66 | 76,72 | 100% | 100% |

| | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------|-------|------|------|
| 7 | Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan | Indeks Kesehatan | 83,35 | 83,77 | 101% | 101% |
| 8 | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat | Indeks Pengeluaran | 78,05 | 75,76 | 97% | 97% |

Keterangan:

* = Nilai realisasi menggunakan hasil pengukuran tahun-tahun sebelumnya atau angka sementara per Februari 2025.

Jika dilihat dari tabel di atas, maka keseluruhan sasaran berhasil, ini berarti dapat dikatakan, program dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota Binjai telah mampu secara efektif menyentuh permasalahan di masyarakat.

Jika dilihat dari tabel di atas, maka ada beberapa indikator yang masih jauh dari yang ditargetkan, yaitu Nilai Evaluasi LPPD, yaitu hanya mendapat Poin 2,6671 dari Poin 3,36 yang ditargetkan, walaupun angka 2,6671* adalah Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022. Begitupun dengan indikator Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB (ADHB), yaitu hanya mendapat 33,38 persen dari 41,70 persen yang ditargetkan.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

8 (delapan) sasaran kinerja memiliki realisasi kinerja di atas 90% maka dapat dikatakan program/kegiatan yang dilakukan sudah efektif dalam menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yang diperjanjikan di tahun 2024. Adapun program yang menunjang keberhasilan per sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.32
Sasaran dengan rata-rata capaian indikator di atas 90% dan program yang mendukung

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Program Pendukung Pencapaian |
|------------|--|----------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan | Indeks Reformasi Birokrasi | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI |
| | | Opini BPK | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI |
| | | Indeks Profesionalitas ASN | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH PROGRAM PEGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | Nilai Evaluasi LPPD | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Program Pendukung Pencapaian |
|-----|---|---------------------------------------|---|
| 2 | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIANDAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |
| | | Persentase kondisi jalan baik | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN |
| | | Persentase akses air minum kota | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE |
| 3 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Program Pendukung Pencapaian |
|-----|---|--|---|
| 4 | Meningkatnya peranan sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan | Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB) | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN |
| | | Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB) | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI |
| | | Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB (ADHB) | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA |
| 5 | Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya Sentra Industri Binjai | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Program Pendukung Pencapaian |
|-----|---|-------------------|--|
| 6 | Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan | Indeks Pendidikan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN |
| 7 | Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan | Indeks Kesehatan | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PER ORANG DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA(KS) |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Program Pendukung Pencapaian |
|-----|---------------------------------------|--------------------|--|
| 8 | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat | Indeks Pengeluaran | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PROGRAM PENANGANAN BENCANA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN |

g. Analisis Atas Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Realisasi anggaran per program pada Pemerintah Kota Binjai adalah sebagaiberikut:

Tabel 2.33
Realisasi Anggaran per Program Tahun 2024

| NO. | PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|-----|---|--------------------|----------------------|-------------|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp 661,867,441,563 | Rp 334.497.913,078 | 51% |
| 2 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Rp 76,392,396,350 | Rp 31,288,449,540.06 | 41% |
| 3 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Rp 1,960,287,340 | Rp 2,126,674,314 | 108% |

| | | | | |
|----|---|-------------------|----------------------|------|
| 4 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Rp 59,757,979,965 | Rp 60.694.787.531,56 | 102% |
| 5 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Rp 777,918,935 | Rp 545.354.000 | 70% |
| 6 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Rp 330,300,000 | Rp 160.328.180 | 49% |
| 7 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Rp 528,296,900 | Rp 500.000.000 | 95% |
| 8 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Rp 2,924,800,000 | Rp 4.728.650.922 | 162% |
| 9 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Rp 9,390,860,000 | Rp 9.614.739.172 | 102% |
| 10 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Rp 6,534,557,000 | Rp 5.920.640.256 | 91% |
| 11 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Rp 2,800,000,000 | Rp 3.043.318.816 | 109% |
| 12 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Rp 11,257,600,000 | Rp 19.395.056.111,91 | 172% |
| 13 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Rp 9,317,200,000 | Rp 18.290.923.759 | 196% |
| 14 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Rp 656,239,965 | Rp 199.505.717 | 30% |
| 15 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Rp 910,815,719 | Rp 376.082.571 | 41% |
| 16 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Rp 223,600,000 | Rp 0 | 0% |
| 17 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Rp 8,219,502,652 | Rp 11.702.732.077,24 | 142% |
| 18 | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Rp 20,000,000 | Rp 0 | 0% |
| 19 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Rp 6,831,852,811 | Rp 6.666.908.849 | 98% |

| | | | | |
|----|---|------------------|------------------|------|
| 20 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Rp 109,660,000 | Rp 104.000.000 | 95% |
| 21 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Rp 4,593,347,200 | Rp 4.706.481.761 | 102% |
| 22 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Rp 157,997,557 | Rp 66.813.800 | 42% |
| 23 | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Rp 11,978,500 | Rp 0 | 0% |
| 24 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rp 453,632,793 | Rp 266.504.515 | 59% |
| 25 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Rp 423,098,080 | Rp 178.959.340 | 42% |
| 26 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Rp 520,213,267 | Rp 368.078.940 | 71% |
| 27 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Rp 78,696,220 | Rp 55.117.000 | 70% |
| 28 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Rp 323,658,740 | Rp 19.605.600 | 6% |
| 29 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Rp 235,158,716 | Rp 160.827.250 | 68% |
| 30 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Rp 57,090,700 | Rp 51.539.000 | 90% |
| 31 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Rp 1,619,669,378 | Rp 1.126.963.900 | 70% |
| 32 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Rp 158,176,496 | Rp 31.658.000 | 20% |
| 33 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Rp 103,256,800 | Rp 27.032.000 | 26% |
| 34 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Rp 370,839,293 | Rp 184.731.600 | 50% |
| 35 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Rp 246,647,340 | Rp 20.396.500 | 8% |

| | | | | | | |
|----|---|----|---------------|----|---------------|------|
| 36 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | Rp | 14,910,400 | Rp | 0 | 0% |
| 37 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Rp | 72,356,640 | Rp | 68.678.400 | 95% |
| 38 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Rp | 27,197,000 | Rp | 21.174.200 | 78% |
| 39 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Rp | 426,593,050 | Rp | 332.490.427 | 78% |
| 40 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Rp | 344,106,149 | Rp | 257.999.570 | 75% |
| 41 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Rp | 9,907,800 | Rp | 6.931.800 | 70% |
| 42 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Rp | 299,062,880 | Rp | 169.488.463 | 57% |
| 43 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Rp | 262,680,000 | Rp | 107.971.700 | 41% |
| 44 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Rp | 2,411,257,833 | Rp | 1.904.282.679 | 79% |
| 45 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Rp | 677,478,019 | Rp | 128.203.000 | 19% |
| 46 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Rp | 35,450,260 | Rp | 0 | 0% |
| 47 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Rp | 964,483,782 | Rp | 945.193.887 | 98% |
| 48 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Rp | 342,551,472 | Rp | 744.585.400 | 217% |
| 49 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Rp | 84,595,912 | Rp | 69.954.600 | 83% |
| 50 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Rp | 238,417,240 | Rp | 213.863.000 | 90% |
| 51 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Rp | 100,349,933 | Rp | 0 | 0% |

| | | | | |
|----|---|------------------|---------------------|------|
| 52 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Rp 350,987,715 | Rp 3.300.000 | 1% |
| 53 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Rp 131,759,057 | Rp 119.958.375 | 91% |
| 54 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Rp 2,656,742,320 | Rp 2.298.053.034,63 | 86% |
| 55 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Rp 25,846,640 | Rp 19.260.366 | 75% |
| 56 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Rp 616,936,816 | Rp 398.100.000 | 65% |
| 57 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Rp 8,689,764,191 | Rp 8.400.897.756 | 97% |
| 58 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Rp 627,360,000 | Rp 534.500.000 | 85% |
| 59 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Rp 19,724,000 | Rp 0 | 0% |
| 60 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Rp 1,187,090,879 | Rp 107.089.700 | 9% |
| 61 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Rp 1,970,907,463 | Rp 1.640.120.703 | 83% |
| 62 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Rp 1,845,348,510 | Rp 1.610.432.500 | 87% |
| 63 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Rp 5,857,164,679 | Rp 5.596.407.087 | 96% |
| 64 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Rp 2,227,422,546 | Rp 2.317.590.709 | 104% |
| 65 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Rp 2,191,822,276 | Rp 2.547.036.260 | 116% |
| 66 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Rp 151,320,630 | Rp 36.268.000 | 24% |

| | | | | |
|----|--|------------------|------------------|------|
| 67 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Rp 217,173,100 | Rp 84.750.188 | 39% |
| 68 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Rp 129,183,396 | Rp 0 | 0% |
| 69 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Rp 63,426,400 | Rp 0 | 0% |
| 70 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Rp 142,696,858 | Rp 0 | 0% |
| 71 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Rp 29,803,259 | Rp 0 | 0% |
| 72 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Rp 595,748,543 | Rp 392.563.281 | 66% |
| 73 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Rp 199,704,908 | Rp 0 | 0% |
| 74 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Rp 195,888,040 | Rp 0 | 0% |
| 75 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Rp 26,500,000 | Rp 0 | 0% |
| 76 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Rp 390,100,000 | Rp 389.008.600 | 100% |
| 77 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Rp 16,210,000 | Rp 0 | 0% |
| 78 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Rp 286,048,046 | Rp 280.969.946 | 98% |
| 79 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Rp 2,968,035,045 | Rp 2.588.440.090 | 87% |
| 80 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Rp 200,000,000 | Rp 200.000.000 | 100% |
| 81 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Rp 475,833,500 | Rp 211.523.819 | 44% |
| 82 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Rp 82,718,294 | Rp 38.400.000 | 46% |
| 83 | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | Rp 5,132,900 | Rp 0 | 0% |

| | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|------|
| 84 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Rp 202,946,200 | Rp 186.195.963 | 92% |
| 85 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Rp 150,000,000 | Rp 243.750.000 | 163% |
| 86 | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | Rp 44,450,000 | Rp 0 | 0% |
| 87 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Rp 160,763,632 | Rp 158.212.131 | 98% |
| 88 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Rp 103,538,500 | Rp 79.266.500 | 77% |
| 89 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Rp 13,744,020,565 | Rp 11.292.922.946 | 82% |
| 90 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Rp 1,522,285,489 | Rp 70.292.525 | 5% |
| 91 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Rp 30,399,227,600 | Rp 32.115.927.579 | 106% |
| 92 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Rp 3,062,168,705 | Rp 1.650.226.268 | 54% |
| 93 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Rp 609,694,295 | Rp 789.099.985 | 129% |
| 94 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Rp 745,725,190 | Rp 606.307.480 | 81% |
| 95 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Rp 27,655,569,504 | Rp 2.953.680.367 | 11% |
| 96 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Rp 749,998,848 | Rp 720.016.138 | 96% |
| 97 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Rp 4,799,992,771 | Rp 5.192.572.918 | 108% |
| 98 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Rp 427,574,130 | Rp 304.325.350 | 71% |
| 99 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Rp 877,002,590 | Rp 576.561.494 | 66% |
| 100 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Rp 1,088,795,150 | Rp 983.242.750 | 90% |
| 101 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Rp 363,203,220 | Rp 320.219.000 | 88% |

| | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|--------------------|------|
| 102 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Rp 121,732,160 | Rp 22,272,150 | 18% |
| 103 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Rp 8,143,752,424 | Rp 8,524,596,038 | 105% |
| 104 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Rp 61,868,340 | Rp 59,137,500 | 96% |
| 105 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Rp 1,605,233,612 | Rp 1.303.865.756 | 81% |
| 106 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Rp 19,577,611,249 | Rp 19.475.903.430 | 99% |
| 107 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Rp 61,549,395 | Rp 73.158.435 | 119% |
| 108 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Rp 321,243,744 | Rp 98.313.204 | 31% |
| 109 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Rp 280,192,693 | Rp 82.237.550 | 29% |
| TOTAL ANGGARAN | | Rp 1,027,930,708,667 | Rp 639,788,565,098 | 62% |

Efisiensi penggunaan anggaran dihitung dengan rumusan:

$$1 - [(\% \text{realisasi anggaran} \times (1 / \% \text{capaian kinerja})) \times 100\%]$$

Dengan rata-rata % realisasi anggaran sebesar 62% (tabel 2.33) dan Rata-rata % capaian kinerja sebesar 98% (tabel 2.1) maka tingkat efisiensi anggaran pada Pemerintah Kota Binjai adalah:

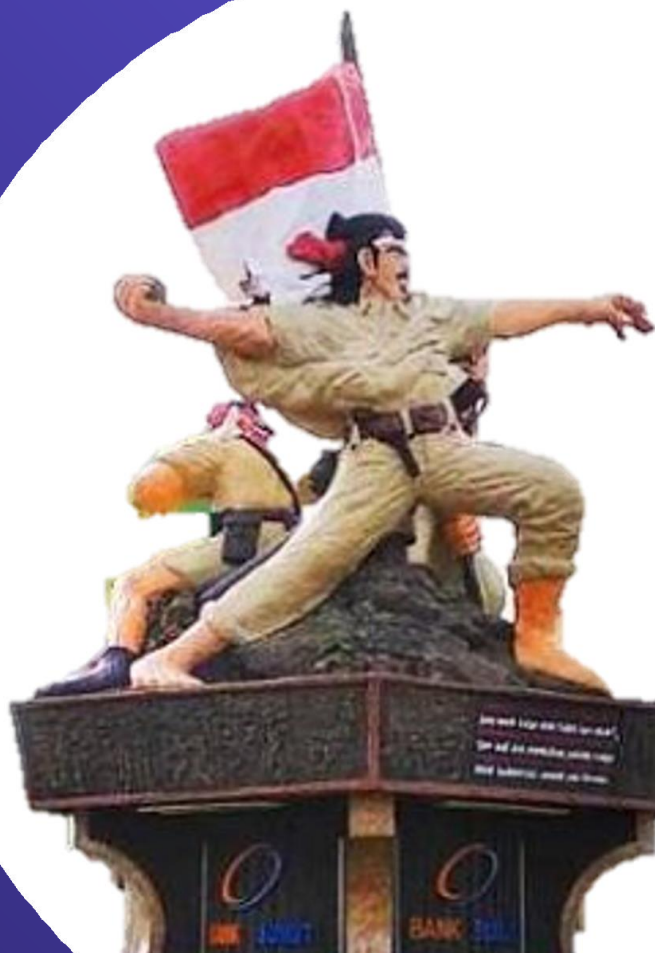
$$= 1 - [62\% \times (1 / 98\%)] \times 100\%$$

$$= 0,367$$

LAMPIRAN



2024



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BINJAI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. H. AMIR HAMZAH, M.AP**

Jabatan : **WALI KOTA BINJAI**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Binjai, Januari 2024

WALI KOTA BINJAI,

Drs. H. AMIR HAMZAH, M.AP

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PEMERINTAH KOTA BINJAI**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|----|---|--|----------|--------|
| 1 | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan | Indeks Reformasi Birokrasi | Kategori | B |
| | | Opini BPK | Opini | WTP |
| | | Indeks Profesionalitas ASN | Poin | 73,00 |
| | | Nilai Evaluasi LPPD | Poin | 3,36 |
| 2 | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur | Nilai | 83 (B) |
| | | Persentase kondisi jalan baik | Persen | 94,00 |
| | | Persentase akses air minum kota | Persen | 98,05 |
| 3 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Poin | 61,00 |
| 4 | Meningkatnya peranan sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan | Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB) | Persen | 11,80 |
| | | Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB) | Persen | 30,20 |
| | | Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB (ADHB) | Persen | 41,70 |
| 5 | Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya Sentra Industri Binjai | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | persen | 6,10 |

| | | | | |
|---|---|--------------------|------|-------|
| 6 | Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan | Indeks Pendidikan | Poin | 76,66 |
| 7 | Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan | Indeks Kesehatan | Poin | 83,35 |
| 8 | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat | Indeks Pengeluaran | Poin | 78,05 |

| No. | PROGRAM | ANGGARAN |
|-----|---|--------------------|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp 661,867,441,563 |
| 2 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Rp 76,392,396,350 |
| 3 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Rp 1,960,287,340 |
| 4 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Rp 59,757,979,965 |
| 5 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Rp 777,918,935 |
| 6 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Rp 330,300,000 |
| 7 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Rp 528,296,900 |
| 8 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Rp 2,924,800,000 |
| 9 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Rp 9,390,860,000 |
| 10 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Rp 6,534,557,000 |
| 11 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Rp 2,800,000,000 |
| 12 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Rp 11,257,600,000 |

| | | | |
|----|---|----|---------------|
| 13 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Rp | 9,317,200,000 |
| 14 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Rp | 656,239,965 |
| 15 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Rp | 910,815,719 |
| 16 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Rp | 223,600,000 |
| 17 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Rp | 8,219,502,652 |
| 18 | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Rp | 20,000,000 |
| 19 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Rp | 6,831,852,811 |
| 20 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Rp | 109,660,000 |
| 21 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Rp | 4,593,347,200 |
| 22 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Rp | 157,997,557 |
| 23 | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Rp | 11,978,500 |
| 24 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rp | 453,632,793 |
| 25 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Rp | 423,098,080 |
| 26 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Rp | 520,213,267 |
| 27 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Rp | 78,696,220 |
| 28 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Rp | 323,658,740 |
| 29 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Rp | 235,158,716 |
| 30 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Rp | 57,090,700 |
| 31 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Rp | 1,619,669,378 |
| 32 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Rp | 158,176,496 |
| 33 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Rp | 103,256,800 |
| 34 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Rp | 370,839,293 |
| 35 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Rp | 246,647,340 |
| 36 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | Rp | 14,910,400 |

| | | | |
|----|---|----|---------------|
| 37 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Rp | 72,356,640 |
| 38 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Rp | 27,197,000 |
| 39 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Rp | 426,593,050 |
| 40 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Rp | 344,106,149 |
| 41 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Rp | 9,907,800 |
| 42 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Rp | 299,062,880 |
| 43 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Rp | 262,680,000 |
| 44 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Rp | 2,411,257,833 |
| 45 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Rp | 677,478,019 |
| 46 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Rp | 35,450,260 |
| 47 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Rp | 964,483,782 |
| 48 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Rp | 342,551,472 |
| 49 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Rp | 84,595,912 |
| 50 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Rp | 238,417,240 |
| 51 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Rp | 100,349,933 |
| 52 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Rp | 350,987,715 |
| 53 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Rp | 131,759,057 |
| 54 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Rp | 2,656,742,320 |
| 55 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Rp | 25,846,640 |
| 56 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Rp | 616,936,816 |
| 57 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Rp | 8,689,764,191 |
| 58 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Rp | 627,360,000 |

| | | | |
|----|--|----|---------------|
| 59 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Rp | 19,724,000 |
| 60 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Rp | 1,187,090,879 |
| 61 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Rp | 1,970,907,463 |
| 62 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Rp | 1,845,348,510 |
| 63 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Rp | 5,857,164,679 |
| 64 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Rp | 2,227,422,546 |
| 65 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Rp | 2,191,822,276 |
| 66 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Rp | 151,320,630 |
| 67 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Rp | 217,173,100 |
| 68 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Rp | 129,183,396 |
| 69 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Rp | 63,426,400 |
| 70 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Rp | 142,696,858 |
| 71 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Rp | 29,803,259 |
| 72 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Rp | 595,748,543 |
| 73 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Rp | 199,704,908 |
| 74 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Rp | 195,888,040 |
| 75 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Rp | 26,500,000 |
| 76 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Rp | 390,100,000 |
| 77 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Rp | 16,210,000 |
| 78 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Rp | 286,048,046 |
| 79 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Rp | 2,968,035,045 |
| 80 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Rp | 200,000,000 |
| 81 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Rp | 475,833,500 |
| 82 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Rp | 82,718,294 |

| | | | |
|-----|--|----|----------------|
| 83 | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | Rp | 5,132,900 |
| 84 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Rp | 202,946,200 |
| 85 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Rp | 150,000,000 |
| 86 | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | Rp | 44,450,000 |
| 87 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Rp | 160,763,632 |
| 88 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Rp | 103,538,500 |
| 89 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Rp | 13,744,020,565 |
| 90 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Rp | 1,522,285,489 |
| 91 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Rp | 30,399,227,600 |
| 92 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Rp | 3,062,168,705 |
| 93 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Rp | 609,694,295 |
| 94 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Rp | 745,725,190 |
| 95 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Rp | 27,655,569,504 |
| 96 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Rp | 749,998,848 |
| 97 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Rp | 4,799,992,771 |
| 98 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Rp | 427,574,130 |
| 99 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Rp | 877,002,590 |
| 100 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Rp | 1,088,795,150 |
| 101 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Rp | 363,203,220 |
| 102 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Rp | 121,732,160 |
| 103 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Rp | 8,143,752,424 |
| 104 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Rp | 61,868,340 |
| 105 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Rp | 1,605,233,612 |
| 106 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Rp | 19,577,611,249 |

| | | | |
|-----------------------|--|----|-------------------|
| 107 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Rp | 61,549,395 |
| 108 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Rp | 321,243,744 |
| 109 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Rp | 280,192,693 |
| TOTAL ANGGARAN | | Rp | 1,027,930,708,667 |

Binjai, Januari 2024

WALI KOTA BINJAI,



Drs. H. AMIR HAMZAH, M.AP



Mak Amir #BINJAI MAJU BERBUDAYA RELIGIUS

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Selamat & Sukses
Kota Binjai
Peringkat Satu

dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik untuk tingkat kota, serta peringkat 5 untuk tingkat kabupaten/kota se-Sumatera Utara
 oleh Ombudsman RI





Amir Hamzah officialamirhamzah

panrb Pemerintah Kota Binjai

Selamat atas diraihnya
SAKIP AWARD 2024

dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Atas Prestasi Pemerintah Kota Binjai dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024

Jakarta, 3 Oktober 2024





Lagi dan lagi
Kota Binjai
Raih Penghargaan

pada Perayaan
Hari Keluarga Nasional ke-30
Provinsi Sumatera Utara

- 1 Juara 1 Pelaksana Audit Kasus Stunting Terbaik**
- 2 Terbaik IV Kategori Laporan Narasi TPPS Semester I**



Selamat & Sukses
Pemerintahan
Kota Binjai Mendapat
4 Penghargaan



Pada kegiatan menyambut Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-31 Sumut yg dipusatkan di Kota Sibolga 23-26 Juli 2024.



Mak Amir #BINJAI MAJU BERBUDAYA RELIGIUS panrb

Selamat & Sukses

Kota Binjai Mendapat Predikat Baik
dalam Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2023

Dengan nilai indeks 2,98. Peringkat 2 Kota se-Sumatera Utara dan peringkat 4 Kab/Kota se-Sumatera Utara

Drs. H. Amir Hamzah, M.AP
Wali Kota Binjai

Mak Amir #BINJAI MAJU BERBUDAYA RELIGIUS KPK

Selamat dan Sukses

Kota Binjai

Atas diraihnya 2 (Dua) Penghargaan dari KPK RI:

1. Penghargaan Peningkatan Monitoring Center of Prevention (MCP) Terbaik 2023 untuk Kategori Kota
2. Penghargaan Sertifikasi Tanah Barang Milik Daerah Terbanyak

dalam Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Korupsi dan Peluncuran MCP Tahun 2024

Drs. H. Amir Hamzah, M.AP
Wali Kota Binjai